



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 23 TAHUN 2019

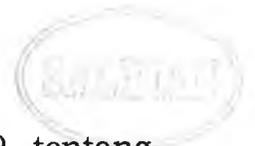
TENTANG

MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan atau teknologi lainnya secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa setiap program dan kegiatan *Smart City* dirumuskan secara komprehensif dan terpadu agar dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN SMART CITY KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 - 2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. *Smart city* adalah konsep pengelolaan daerah berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II MASTERPLAN

Pasal 2

Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2028 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi - misi Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Pemalang Cerdas yang Mudah, Nyaman dan Berkelanjutan dan
- b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*.

Pasal 4

- (1) *Master Plan* Pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Buku I (Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Pemalang)
 - b. Buku II (*Masterplan Smart City* Kabupaten Pemalang)
 - c. Buku III (*Executive Summary Smart City* Kabupaten Pemalang)
- (2) Rincian *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

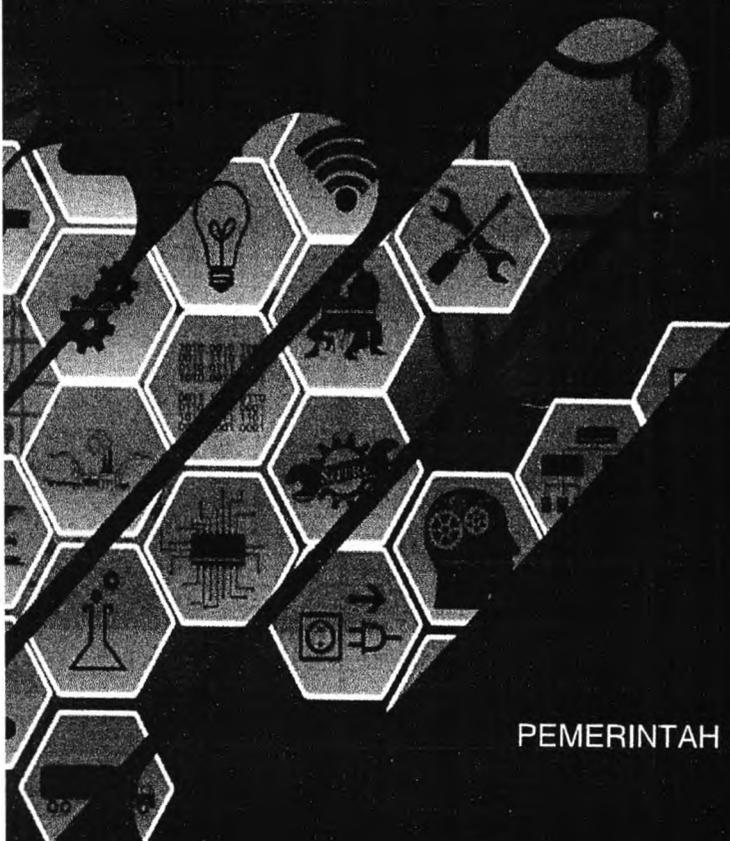


MASTERPLAN

SMART CITY KABUPATEN PEMALANG
Tahun 2018 - 2028

BUKU I

(Analisis Strategis Smart City Kabupaten Pemalang)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I ANALISIS KONDISI MASA DEPAN.....	1
A. Analisis Kecenderungan (<i>Trend</i>) Perkembangan Kabupaten Pemalang.....	1
B. Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat Kabupaten Pemalang.....	9
C. Analisis Daya Saing Kabupaten Pemalang.....	10
1. Daya Saing Alam.....	10
2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	11
3. Daya Saing Ekonomi.....	13
4. Kerjasama Daerah.....	14
D. Analisis Kelembagaan dan Relevansi terhadap Stakeholder.....	15
BAB II Analisis Kesiapan Daerah.....	18
A. Analisis Kesiapan Nature.....	18
B. Analisis Kesiapan Struktur Daerah.....	21
1. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia.....	21
2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan.....	22
3. Analisis Kualitas Sumber Daya Keuangan.....	25
C. Analisis Kesiapan Infrastruktur Daerah.....	26
1. Analisis Infrastruktur Fisik.....	26
2. Analisis Infrastruktur Digital Daerah.....	27
3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	23
D. Analisis Kesiapan Suprastruktur.....	29
1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah.....	29
2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.....	30
3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.....	31
E. Analisis Kesiapan Culture.....	32
BAB III Analisis Kesenjangan.....	34
A. Analisis SWOT Kesiapan Nature dan Culture.....	34
B. Analisis SWOT Kesiapan Struktur.....	35
C. Analisis SWOT Kesiapan Infrastruktur.....	35
D. Analisis SWOT Kesiapan Suprastruktur.....	36
E. Analisis Gap atau Kesenjangan.....	37
BAB IV Analisis Visi Pembangunan <i>Smart city</i>.....	43
A. Sasaran <i>Smart city</i>	43
1. <i>Smart Governance</i>	43
2. <i>Smart Branding</i>	43
3. <i>Smart Economy</i>	43

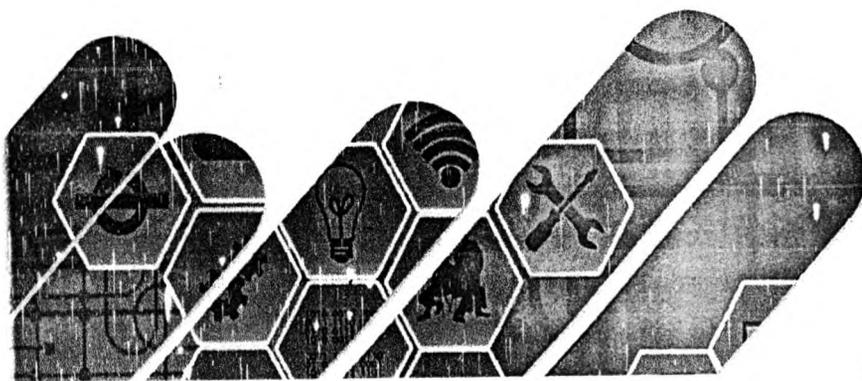
4. Smart Living	44
5. Smart Society	44
6. Smart Environment	45
B. Analisis Visi Pembangunar <i>Smart city</i>	45
1. Analisis Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang	45
2. Analisis Visi dan Misi Pembangunan <i>Smart city</i> Kabupaten Pemalang	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 LQ Kabupaten Pemalang	3
Tabel 2 Makna Logo City Branding Pemalang	8
Tabel 3 Analisis Kelembagaan dan Relevansi.....	15
Tabel 4 Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia.....	21
Tabel 5 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan	23
Tabel 6 Analisis Kualitas Sumber Daya Keuangan	25
Tabel 7 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	27
Tabel 8 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah.....	28
Tabel 9 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	29
Tabel 10 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	30
Tabel 11 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.....	31
Tabel 12 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	31
Tabel 13 Analisis Swot Aspek Nature dan CULTURE.....	34
Tabel 14 Analisis Swot Aspek Struktur	35
Tabel 15 Analisis Swot Aspek Infrastruktur.....	35
Tabel 16 Analisis Swot Aspek Suprastruktur.....	36
Tabel 17 Analisis Gap aspek Smart Governance.....	37
Tabel 18 Analisis Gap <i>Smart Branding</i>	38
Tabel 19 Analisis Gap <i>Smart Economy</i>	39
Tabel 20 Analisis Gap <i>Smart Living</i>	40
Tabel 21 Analisis Gap <i>Smart Society</i>	40
Tabel 22 Analisis Gap Smart Environment	41
Tabel 23 Analisis Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Pemalang.....	1
Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2010-2025 menurut Lapangan Usaha	3
Gambar 3 Proyeksi Penduduk.....	5
Gambar 4 Beberapa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.....	5
Gambar 5 Logo <i>City Branding</i> Kabupaten Pemalang "Pusere Jawa"	7
Gambar 6 Produktivitas Padi.....	10
Gambar 7 Produktivitas Jagung.....	11
Gambar 8 Perbandingan IPM Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2017	12
Gambar 9 Perbandingan Jumlah Kabupaten Sekitar Pemalang.....	12
Gambar 10 Trend Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya	13
Gambar 11 Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya.....	14



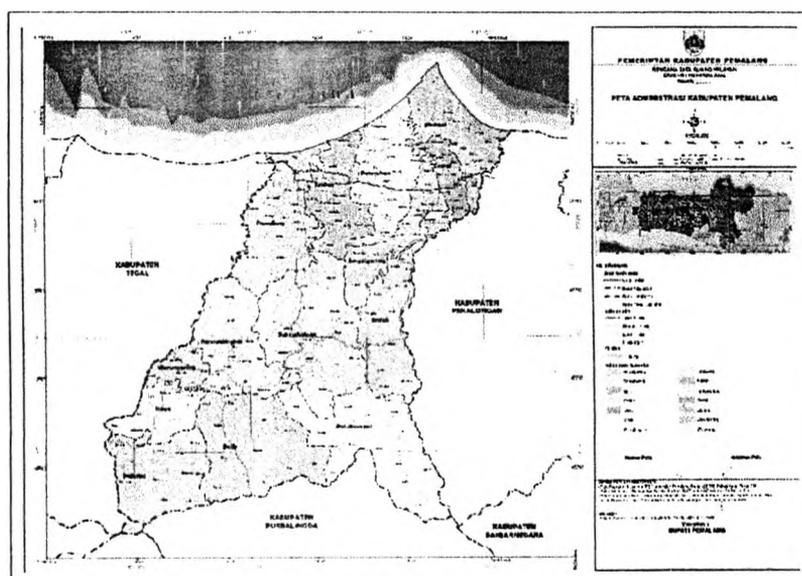
BAB I

ANALISIS KONDISI MASA DEPAN

Analisis kondisi masa depan (*outlook*) merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Analisis ini dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan wilayah, perilaku *stakeholder*, daya saing wilayah, kelembagaan dan relevansi dengan *stakeholder*. Analisis dilakukan dengan memproyeksikan berbagai data serta melihat nilai-nilai sosial maupun budaya yang berkembang dalam suatu wilayah untuk melihat kecenderungan perilaku para *stakeholder*. Analisis kondisi masa depan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu wilayah untuk mencapai tujuan wilayahnya, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan *smart city*. Hasil dari analisis kondisi masa depan nantinya akan mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang.

A. Analisis Kecenderungan (*Trend*) Perkembangan Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dilalui Jalan Nasional Rute 1, atau yang lebih dikenal dengan Jalan Raya Pantai Utara (Pantura). Adanya Jalan Raya Pantura menyebabkan adanya perkembangan secara tidak langsung, baik secara keruangan, ekonomi, penduduk dan tentunya dalam hal penggunaan teknologi.

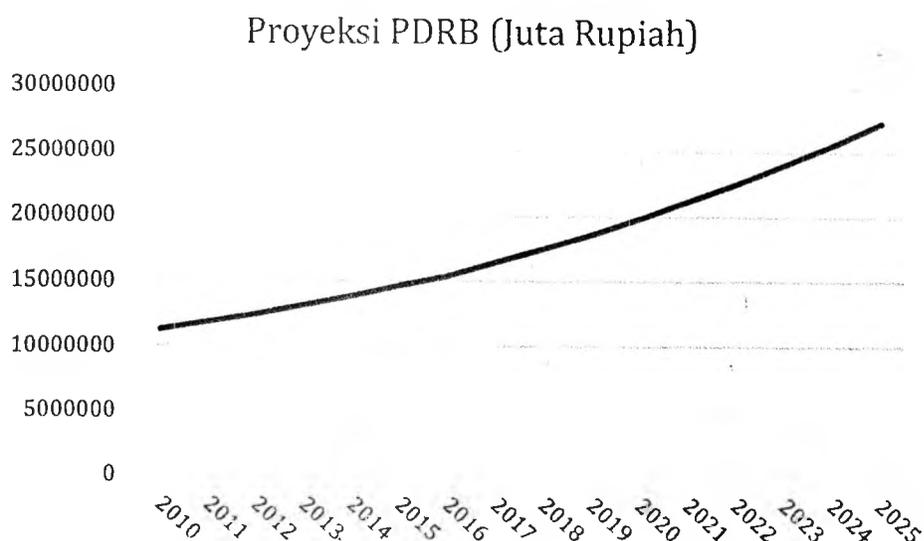


Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Pemalang

Perkembangan Kabupaten Pemalang cenderung berpusat di wilayah ibukota kabupaten dan di sekitar Jalan Raya Pantura. Hal tersebut membuat bagian utara Kabupaten Pemalang cenderung lebih berkembang jika dibandingkan dengan bagian selatan. Pada bagian selatan Kabupaten Pemalang terdapat kawasan kaki Gunung Slamet yang tergolong sebagai kawasan hutan lindung, sehingga kawasan tersebut perlu dijaga kelestariannya. Hingga saat ini arah perkembangan Kabupaten Pemalang dibagi menjadi dua yakni perkembangan perkotaan di bagian utara (sepanjang Jalan Raya Pantura) dan kawasan konservasi hutan di bagian selatan.

Proyeksi arah perkembangan Kabupaten Pemalang tentunya mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, salah satunya adalah dokumen RTRW Kabupaten Pemalang. Pada rencana struktur ruang, kawasan perkotaan Pemalang dan Comal akan dijadikan pusat pelayanan dengan hierarki tertinggi di Kabupaten Pemalang. Kedua pusat ini akan lebih berkembang dibandingkan kawasan lainnya. Selain itu, di dalam RTRW Kabupaten Pemalang juga memuat beberapa rencana kawasan strategis, diantaranya adalah Kawasan Strategis Agropolitan dan Kawasan Strategis Pariwisata. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut merupakan sektor strategis yang akan terus dikembangkan kedepannya. Perkembangan spasial tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi, teknologi dan kependudukan.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk melihat arah perkembangan suatu wilayah adalah struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Hal tersebut dipengaruhi oleh peranan dan kontribusi dari sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk perekonomian Kabupaten Pemalang yaitu sektor pertanian, yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan/perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2016, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 24,9 % dari jumlah keseluruhan PDRB. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian adalah industri pengolahan (20,6%) serta perdagangan dan jasa (16,85%). Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Pemalang menurut lapangan usaha mencapai 15 triliun rupiah. Apabila diproyeksikan menggunakan metode geometri sampai dengan tahun 2025, PDRB Kabupaten Pemalang menurut lapangan usaha akan mencapai 27 triliun rupiah.



Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2010-2025 menurut Lapangan Usaha

Selain proyeksi PDRB, Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah analisis LQ. Tabel 1 menjelaskan kondisi LQ dari tiap sektor di Kabupaten Pemalang. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki sektor basis yang cukup beragam apabila ditinjau melalui LQ statis (SLQ) dan LQ dinamis (DLQ). Terdapat 4 kelompok sektor yaitu sektor unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang.

Tabel 1 LQ Kabupaten Pemalang

Sektor	Static LQ	Dynami c LQ	Interpretas i	Kesimpula n
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,81663	0,99941	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
B. Pertambangan dan Penggalian	2,02818	0,91501	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
C. Industri Pengolahan	0,59120	1,01380	SLQ<1 DLQ>1	Berkembang
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,32670	1,09390	SLQ>1 DLQ>1	Unggulan
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23698	1,00399	SLQ>1 DLQ>1	Unggulan
F. Konstruksi	0,42008	1,00498	SLQ<1 DLQ>1	Berkembang
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17297	1,01752	SLQ>1 DLQ>1	Unggulan

Sektor	Static LQ	Dynami c LQ	Interpretasi	Kesimpulan
H. Transportasi dan Pergudangan	0,90396	1,01451	SLQ<1 DLQ>1	Berkembang
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,77422	0,99992	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
J. Informasi dan Komunikasi	0,58936	0,97406	SLQ<1 DLQ<1	Terbelakang
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,07801	0,99350	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
L. Real Estate	0,99423	0,99342	SLQ<1 DLQ<1	Terbelakang
M,N. Jasa Perusahaan	1,01325	0,96480	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22089	0,98775	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
P. Jasa Pendidikan	1,40534	0,98991	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22611	0,98153	SLQ>1 DLQ<1	Potensial
R. Jasa lainnya	1,76676	0,95656	SLQ>1 DLQ<1	Potensial

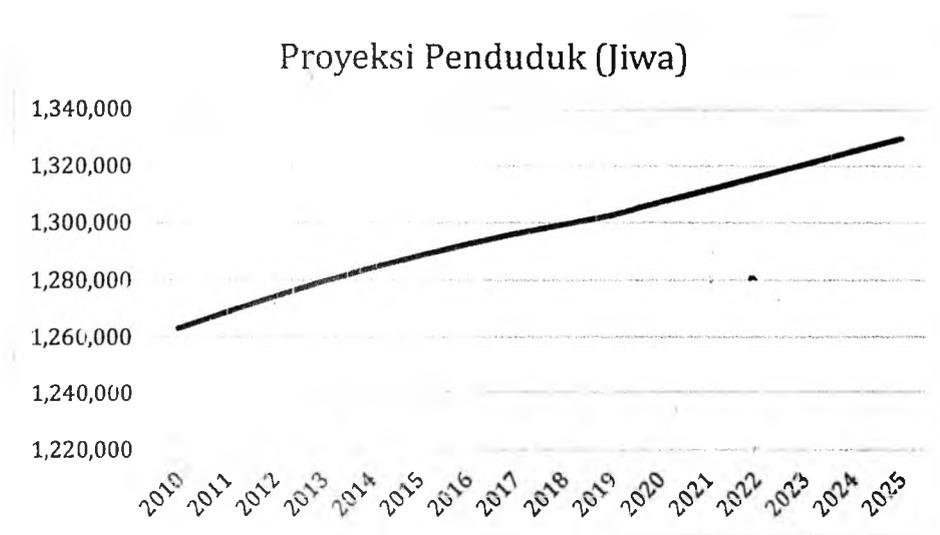
Sektor unggulan merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai SLQ > 1 dan DLQ > 1. Sektor yang termasuk kedalam sektor unggulan diantaranya perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor pengadaan listrik dan gas. Beberapa sektor tersebut menjadi sektor basis di Kabupaten Pemalang dan secara pertumbuhan sektornya pun merupakan sektor basis di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Sektor potensial merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai SLQ > 1 dan DLQ < 1, artinya secara kondisi eksisting sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis untuk wilayahnya, namun pertumbuhannya di daerah lain lebih tinggi jika dibandingkan di wilayah tersebut. Pada Kabupaten Pemalang, sektor yang memiliki nilai SLQ > 1 adalah sektor pertanian dan jasa lainnya, yang dimana nilainya mendekati angka 2. Dikarenakan nilai SLQ sektor tersebut melebihi angka 1, Kabupaten Pemalang mampu untuk mengeksport hasil produksi dari sektor tersebut.

Sektor berkembang merupakan kelompok sektor yang memiliki nilai SLQ < 1 dan DLQ > 1. Hal tersebut dapat diartikan bahwa secara eksisting sektor tersebut di Kabupaten Pemalang bukan merupakan sektor basis di Provinsi Jawa Tengah, namun dari perbandingan pertumbuhannya ada tren untuk menuju menjadi sektor basis. Sektor yang termasuk kedalam sektor berkembang diantaranya adalah sektor konstruksi dan transportasi & pergudangan.

Kelompok sektor yang keempat adalah kelompok sektor terbelakang. Kelompok ini terdiri dari sektor informasi dan komunikasi serta real estate. Sektor ini tidak memiliki keunggulan secara eksisting maupun secara pertumbuhan.

Melihat dari aspek kependudukan, masyarakat Kabupaten Pemalang cenderung bertempat tinggal di Kecamatan yang berdekatan dengan pantai utara. Hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang berada di wilayah pantai mencapai 57,77% dari total seluruh penduduk. Untuk presentase jumlah penduduk yang berada di wilayah pegunungan sebesar 25,51% dan di wilayah dataran rendah sebesar 17,42% . Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang 1.292.573 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun 2016-2017 mencapai 0,29%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Pemalang yaitu Kecamatan Taman dengan kepadatan penduduk sebesar 2.399,38 jiwa/km².



Gambar 3 Proyeksi Penduduk
Sumber: Analisis Penyusun

Gambar 3 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pemalang hingga tahun 2025. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang diproyeksikan akan bertambah hingga 40 ribu penduduk dalam kurun waktu 10 tahun. Proyeksi tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk yang mengikuti tren dan tidak terdapat peristiwa luar biasa. Hasil proyeksi jumlah penduduk juga menggambarkan



Gambar 4 Beberapa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang

kecenderungan penduduk akan terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman.

Dalam penggunaan teknologi, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengembangkan 51 sistem informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pelayanan publik dan akses informasi mengenai Kabupaten Pemalang dapat diakses secara daring melalui situs www.pemalangkab.go.id. Selain situs tersebut, sekitar 80% masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki situs yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang ada di Kabupaten Pemalang.

Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, belum terintegrasinya sistem elektronik antar OPD, masih kurangnya sarana & prasarana penunjang komunikasi dan informatika, serta belum meratanya akses informasi. Selain itu, sistem keamanan jaringan komunikasi pemerintah Kabupaten Pemalang juga masih rawan untuk dirusak.

Untuk menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai *smart city*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi yang dilakukan antara lain adalah optimalisasi dan mengintegrasikan kinerja OPD. Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendorong pemanfaatan media informasi, dan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki target pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh desa di Kabupaten Pemalang. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membentuk Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (Puspindes).

Puspindes merupakan inovasi dari pemerintah daerah yang berkerjasama dengan relawan TIK di Kabupaten Pemalang di bawah pengawasan Dinpermasdes. Puspindes bertugas untuk mengembangkan kawasan pedesaan Kabupaten Pemalang menjadi Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (Destika) melalui kegiatan pemberdayaan desa. Salah satu produk dari Puspindes adalah SIDEKEM. SIDEKEM merupakan sistem yang memuat data-data pada beberapa tingkat administrasi seperti kecamatan bahkan desa. Data yang ada dapat dikelola dan dikontrol oleh

pemerintah desa. Selain itu, mulai dikembangkan pula beberapa kegiatan seperti pelatihan TIK untuk perangkat desa dan pusat internet desa.

Kabupaten Pemalang telah membuat *city branding* beserta logo yang telah diterbitkan pada tahun 2017. Kabupaten Pemalang juga memiliki *branding* "Pusere Jawa" karena letak geografis Kabupaten Pemalang tepat di tengah Pulau Jawa. Letak Kabupaten Pemalang yang berada di tengah Pulau Jawa dapat dilihat dari bentangan garis dari Anyer ke Panarukan¹. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang cukup strategis dan dapat menjadi faktor pendorong untuk mengembangkan Kabupaten Pemalang menjadi sebuah kota yang cerdas. Harapannya Kabupaten Pemalang dapat menjadi Pusat atau Poros Wilayah pengembangan baru di Pulau Jawa melalui pengembangan potensi unggulan Daerah, pengembangan investasi, yang dapat memberikan kehidupan dan penghidupan bagi wilayahnya sendiri dan wilayah lain, menjadi tempat "singgah" dengan menawarkan segala sumber daya yang dimiliki, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kabupaten Pemalang juga merujuk pada Khasanah Budaya Jawa, baik yang diwujudkan dalam bentuk fisik maupun tercermin dalam karakter dan ciri kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Pemalang.



Gambar 5 Logo *City Branding* Kabupaten Pemalang "Pusere Jawa"

Logo *City Branding* Kabupaten Pemalang terinspirasi dari sumber daya alam yang dimiliki kabupaten berupa air. Logo terinspirasi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten berupa AIR. Air mempunyai banyak manfaat dalam peranan kehidupan seluruh makhluk hidup, memberi manfaat bagi seluruh masyarakat kota maupun luar kota, orang bijak mengatakan "***Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya***". Air menggambarkan kesejukan, kesuburan, ketenangan, harapan dan keselarasan Kabupaten Pemalang, yang selalu menjunjung tinggi kebudayaan jawa serta mampu menempatkan diri disegala kondisi. Awal huruf besar dan kombinasi warna merah menggambarkan semangat yang luar biasa serta antusiasme masyarakat untuk membangun kota. Kombinasi

¹ Dilansir dari laman <http://www.kabarpemalang.id/2016/12/pemalang-pusere-jawa-city-branding-itu.html>

warna dasar yang berbeda bahwa Kabupaten Pemalang menggambarkan heterogenisasi elemen masyarakat yang mengedepankan kebersamaan keselarasan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan.

Tabel 2 Makna Logo City Branding Pemalang

Logo	Makna
	Gambar Air dan ombak : Air menggambarkan semangat juang dan loyalitas tanpa batas yang terus mengalir berkelanjutan dari Pemimpin yang selalu memberi pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat yang aktif dan guyub dalam aktivitas pembangunan menuju prestasi tiada henti. Ombak menggambarkan identitas bahari yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang
	Gambar Kepiting pada Huruf "e" : Budidaya Kepiting Soka merupakan salah satu sumber potensi ekonomi masyarakat Kawasan Minapolitan di Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Budidaya Kepiting Soka juga mampu menembus pasar nasional dan termasuk salah satu komoditi ekspor Indonesia.
	Gambar Huruf "m" (MOUNT) yang berbentuk Gunung : Selain dibatasi oleh laut, Kabupaten Pemalang memiliki daerah pegunungan yaitu berupa Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, selain itu ada beberapa gunung-gunung kecil yaitu Gunung Gajah yang terletak di Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal dan Bukit Mendelem atau Gunung Jimat yang terletak di Desa Mendelem Kecamatan Belik. Dengan adanya pegunungan tentu banyak panorama yang menawarkan keindahan alam dan sumber daya alam yang sangat potensial seperti : Tambang Diorit, Kaolin, Batu Gamping dan Batu Marmer.
	Gambar Lengkungan kecil pada huruf "a" : Menggambarkan jajanan khas Kabupaten Pemalang yaitu Ogel-Ogel. Jajanan ini sudah sangat melekat sebagai jajanan khas Kabupaten Pemalang
	Gambar Nanas : Nanas Madu merupakan salah satu Buah Unggulan Kabupaten Pemalang dan digemari oleh masyarakat luas, baik dalam kota maupun luar kota dan bisa bersaing di pasar tradisional maupun pasar modern. Daun yang berjumlah lima berarti prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan dan berkembang, lima prinsip tersebut diantaranya yaitu : 1. Ekologi, 2. Ekonomi, 3. Equity (pemerataan), 4. Engagement (peran serta) 5. Energi.

	<p>Gambar huruf "g" : merupakan inisial dari beberapa makanan dan produk khas Kabupaten Pemalang diantaranya "GROMBYANG", hidangan nasi Grombyang ini berkuah dan mirip soto. Hidangan ini banyak diminati oleh warga dari luar kota. Selain Grombyang, produk khas Kabupaten Pemalang yang berinisial "G" adalah sarung "GOYOR" yang dikenal dengan nama "Toldem" yang dikenal sampai ke Timur Tengah, kerajinan "GERABAH dan sapu "GLAGAH".</p>
	<p>Gambar motif batik pada huruf "g" : Menggambarkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki tarian Khas yaitu Tari Selendang Pemalang (TSL). Beberapa motif batik mempunyai arti Ragam gerak Tari Selendang Pemalang merupakan penggabungan ragam gerak dari beberapa daerah.</p>

Sumber: <https://www.pemalangkab.go.id/city-branding/>

B. Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang berada di bagian utara Pulau Jawa, masuk dalam daerah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang dilalui oleh Jalur Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Pemalang memiliki bentang alam yang beranekaragam, dimulai dari daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan.

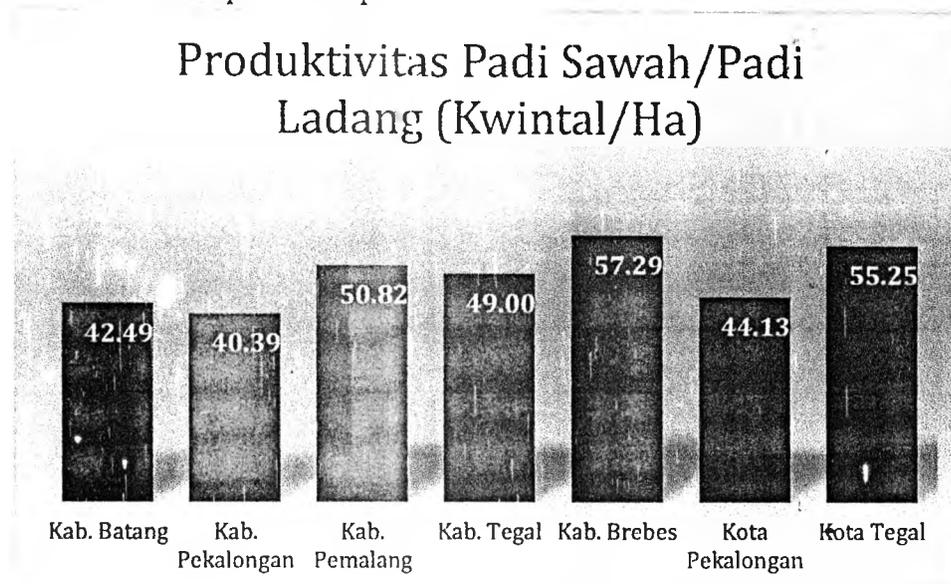
Secara umum, masyarakat Kabupaten Pemalang ingin terpenuhinya pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, dll. Dengan adanya pemanfaatan TIK akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dan lebih tepat sasaran.

Selain terpenuhinya pelayanan dasar, masyarakat tentunya ingin agar adanya pengembangan sistem keamanan pada kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan di Kabupaten Pemalang dilalui oleh Jalan Raya Pantura yang menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi sangat padat sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Maka dari itu, pengembangan program *smart city* diharapkan mampu menjawab permasalahan dasar yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program yang diprioritaskan adalah program perizinan, kesehatan, pendidikan sehingga akan langsung terlihat dampaknya di masyarakat.

C. Analisis Daya Saing Kabupaten Pemalang

1. Daya Saing Alam

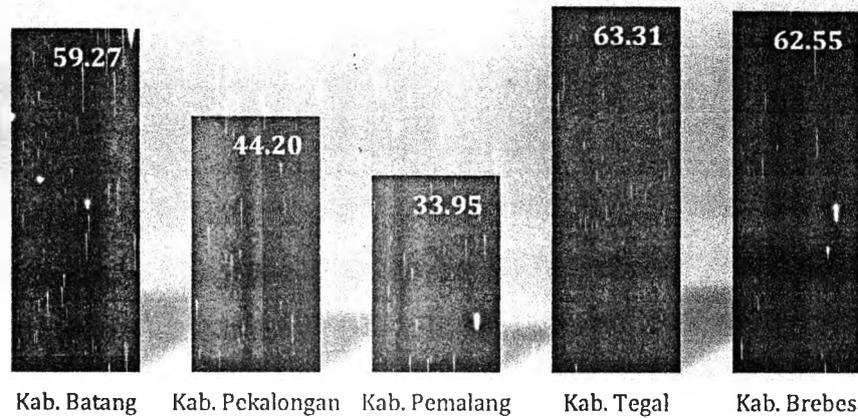
Analisis daya saing dari segi alam dijelaskan sebagai analisis yang melihat perbandingan Kabupaten Pemalang dengan kabupaten di sekitarnya dalam hal kondisi alam. Kondisi alam yang dapat dibandingkan di dalam konteks ini adalah produktivitas beberapa sektor pertanian.



Gambar 6 Produktivitas Padi
Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017

Padi merupakan salah satu komoditas yang dapat digunakan untuk membandingkan seberapa produktif lahan di kabupaten. Data Jawa Tengah dalam angka memperlihatkan bahwa Kabupaten Pemalang secara umum termasuk kabupaten dengan produktivitas padi dan sawah yang cukup baik di bandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya. Hal ini tergambar juga pada produksi beras di Jawa Tengah. Kabupaten ini masuk kedalam 10 kabupaten penghasil beras di Jawa Tengah selain kabupaten Cilacap, Demak, Grobogan, Brebes, Pati, Sragen, Banyumas, Kebumen, Pemalang, Klaten, dan Blora. Jumlah produksi beras di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 mencapai 614.415 ton dan sudah meningkat dibandingkan pada tahun 2015. Berbeda dengan padi sawah/padi ladang, Kabupaten Pemalang memiliki produktivitas jagung yang cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha)

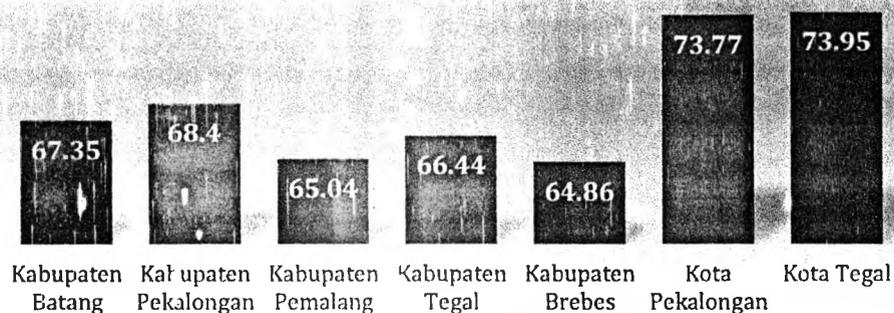


Gambar 7 Produktivitas Jagung
Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing SDM dilakukan untuk melihat kemampuan Kabupaten Pemalang dari segi kualitas dan kuantitas jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. Dari segi kualitas perbandingan itu dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dari segi kuantitas dapat dilihat dari perbandingan angka beban tanggungan antar kabupaten tersebut.

Perbandingan IPM Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2017

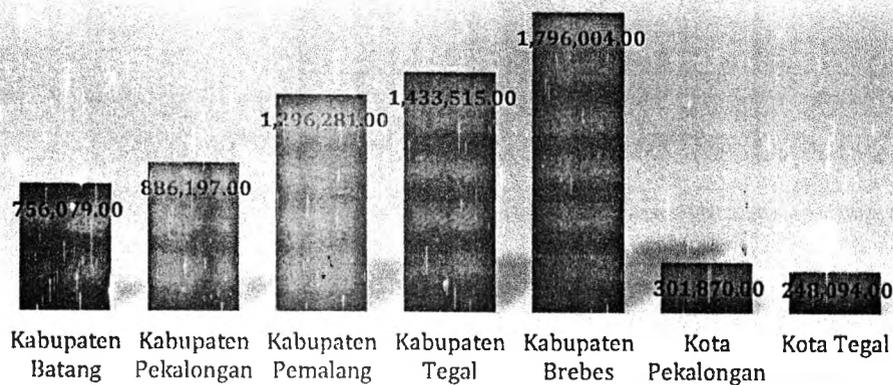


Gambar 8 Perbandingan IPM Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2017

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017

Dari Indeks Pembangunan Manusia, terlihat bahwa posisi Kabupaten Pemalang termasuk kedalam Kabupaten yang IPMnya rendah. Kabupaten Pemalang hanya berada 1 tingkat diatas Kabupaten Brebes. Secara kualitas, Kabupaten Pemalang perlu untuk meningkatkan pembangunan pada sektor yang berhubungan dengan pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan.

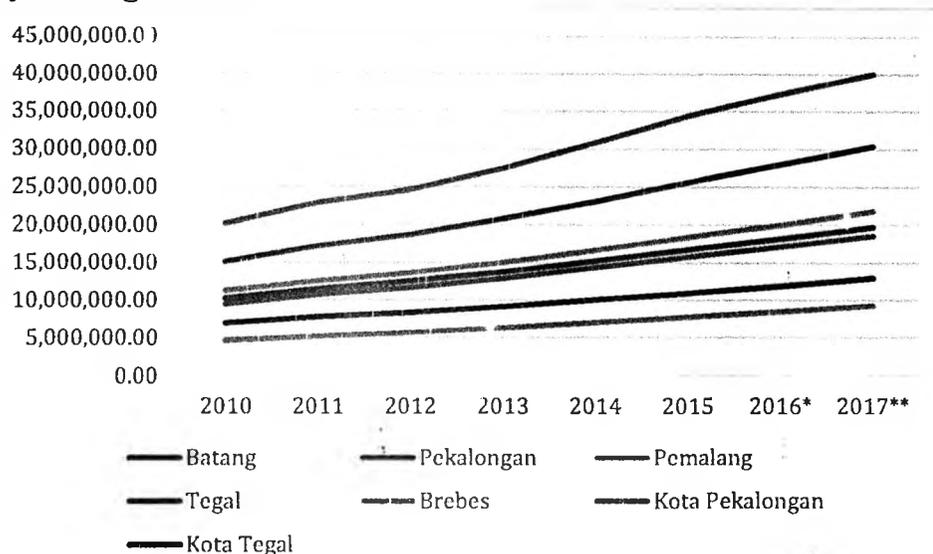
Jumlah Penduduk (Jiwa)



Gambar 9 Perbandingan Jumlah Kabupaten Sekitar Pemalang
Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017

Dari jumlah penduduknya sendiri, jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang cukup tinggi jika dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini mengindikasikan terdapat potensi tenaga kerja yang cukup tinggi di Kabupaten Pemalang.

3. Daya Saing Ekonomi

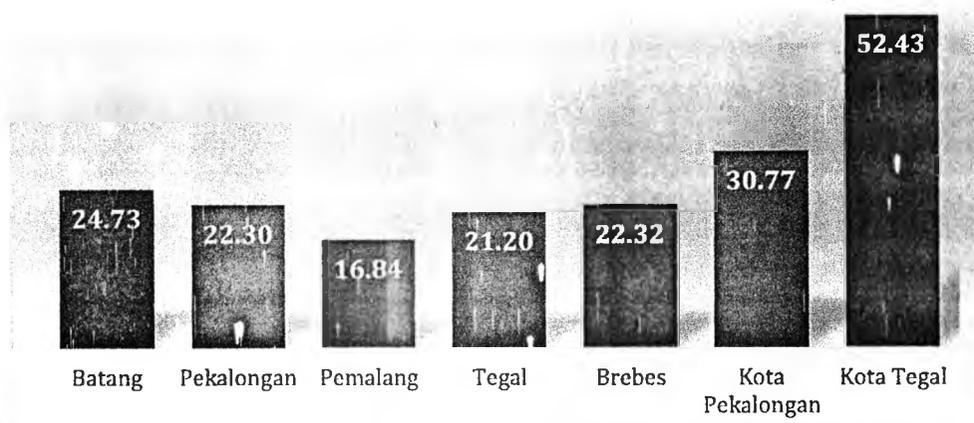


Gambar 10 Trend Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya (Dalam Juta Rupiah)

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017

Trend pertumbuhan PDRB, Kabupaten Pemalang termasuk kedalam kelompok tengah dalam tingkatan jumlah PDRB dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar. Dan dapat terlihat pula bahwa trend posisi tersebut cenderung tidak berubah dalam 8 tahun tersebut. Pada Tahun 2015 dan 2016 sendiri terlihat terdapat gap yang semakin besar antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Pemalang.

PDRB/ Kapita (Juta Rupiah/Jiwa)



Gambar 11 Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya

Namun apabila ditinjau PDRB/Kapita, Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten dengan angka terendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

4. Kerjasama Daerah

Kabupaten yang terdapat di Jawa Tengah telah memiliki bentuk kerjasama antar daerah, termasuk Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki bentuk kerjasama berbasis kluster daerah yang diberi nama Sapta Mitra Pantura (Sampan). Sampan adalah bentuk kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan daerah yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi dimana kabupaten yang terlibat merupakan kabupaten yang berada di dalam kluster wilayah yang sama. Sampan diikuti oleh beberapa kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Sampan telah menjadi salah satu media kerjasama dan kolaborasi antar daerah di wilayah Pantura melalui pendekatan kewilayahan.

Namun kinerja Sampan sebagai bentuk kerjasama daerah belum dapat berlangsung dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih tingginya ego masing-masing kabupaten. Selain itu, didalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah terdapat bentuk pemisah berupa adanya kerjasama lain yang hanya melibatkan beberapa kabupaten, yakni Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan

Petanglong (Kemasyarakatan Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan).

Bentuk kerjasama yang dilakukan pada kawasan Bregasmalang cukup luas, mulai dari transportasi, persampahan, air bersih dan lain-lain. Akan tetapi, bentuk kerjasama tersebut belum membuahkan hasil. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih adanya ego lokal dari setiap kabupaten dalam melakukan kerjasama tersebut.

D. Analisis Kelembagaan dan Relevansi terhadap Stakeholder

Analisis ini meninjau respon kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang yang dilihat dari tren perkembangan daerah dan kondisi saat ini. Analisis ini akan menggambarkan kebutuhan *stakeholder* dalam mewujudkan program yang dibutuhkan *Smart City* Kabupaten Pemalang.

Tabel 3 Analisis Kelembagaan dan Relevansi

Kebutuhan <i>Stakeholder</i>	Jenis Kebutuhan	Kesesuaian dengan Lembaga Diskominfo
Integrasi sistem pendidikan	<i>e-Government</i>	Pengembangan sistem pelayanan publik dengan pembuatan sistem dan implementasinya yang diwadahi oleh layanan <i>e-Government</i> .
Integrasi data kependudukan dan administrasi	<i>e-Government</i>	
Pelayanan medis <i>on-line</i>	<i>e-Government</i>	
Integrasi pengelolaan sampah	<i>e-Government</i>	
Pengembangan <i>branding</i> wisata lokal	<i>e-Government</i>	Pembuatan <i>platform</i> pariwisata Kabupaten Pemalang sebagai wadah promosi dan membantu kegiatan pariwisata (lokasi wisata, penginapan, kuliner, oleh-oleh) atau kerjasama dengan berbagai

Kebutuhan <i>takeholder</i>	Jenis Kebutuhan	Kesesuaian dengan Pambina Diskominfo
		Influencer
Pengembangan ekonomi lokal	<i>e-Government</i>	Pembuatan <i>platform</i> tentang pemasaran produk lokal
Literasi Digital dan Pemanfaatan internet yang produktif	Program Literasi	Pengembangan program literasi digital sedini mungkin.
Sistem Transportasi yang Terintegrasi	<i>Smart Infrastructure</i>	Kebutuhan akan <i>smart infrastructure</i> hanya secara parsial terwadahi dalam tugas pokok, dan fungsi Diskominfo. Namun dalam pengembangan <i>smart infrastructure</i> dibutuhkan kerjasama dengan berbagai OPD dan pengembang yang
Perpustakaan digital	<i>Smart Infrastructure</i>	
CCTV	<i>Smart Infrastructure</i>	

Dalam pengembangan kelembagaan pengembangan *smart city* perlu dilihat pula rencana pengembangan *smart city* yang akan dikembangkan kedepannya. Berdasarkan hasil Bimtek 1, dijelaskan beberapa hal yang akan menjadi pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang. Sebagian besar rencana tentunya masih mengarah kepada kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perizinan. Hal ini dapat menjadi arahan Kabupaten Pemalang dalam mengembangkan *smart city*.

Dalam kelembagaan yang dibentuk dan berkaitan dengan program *smart city*, Kabupaten Pemalang telah memiliki Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Pemalang. Dewan *Smart City* bertugas memberikan arahan inisiasi program-program *smart city*. Program atau aplikasi yang akan dikembangkan nantinya akan dijalankan di bawah pengawasan Dewan *Smart City* tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan *Smart City* melakukan kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program atau rencana yang akan dikembangkan. Misalnya ketika melakukan pengembangan *platform* ekonomi lokal maka Dewan *Smart City* akan bekerjasama dengan beragam *stakeholder* seperti pelaku UMKM, *marketplace*, dan institusi pendidikan.

Kabupaten Pemalang tentunya juga membutuhkan program literasi digital untuk mendukung tercapainya program *smart city*. Literasi digital dibutuhkan sebagai *capacity building* bagi pemerintah, masyarakat dan aktor yang terlibat di dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang sehingga nantinya program-program *smart city* yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

BAB II

Analisis Kesiapan Daerah

A. Analisis Kesiapan Nature

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang dilewati Jalan Pantai Utara di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak di antara 80 52' 30" - 70 20' 11" Lintang Selatan (LS) dan antara 1090 17' 30"- 1090 40' 30" Bujur Timur (BT) yang memiliki luas 1.115,30 km². Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang berada di Kecamatan Pemalang. Kecamatan-kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Pemalang diantaranya adalah Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.² Kabupaten Pemalang berbatasan dengan wilayah berikut:

Utara: Laut Jawa
Selatan: Kabupaten Purbalingga
Timur: Kabupaten Pekalongan
Barat: Kabupaten Tegal

Bentang alam Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang beragam. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi dua sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.³ Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi Endapan Aluvial, Kelompok Litosol, Latosol, Regosol, Andosol, dan Podsolik.

- Jenis Aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami.

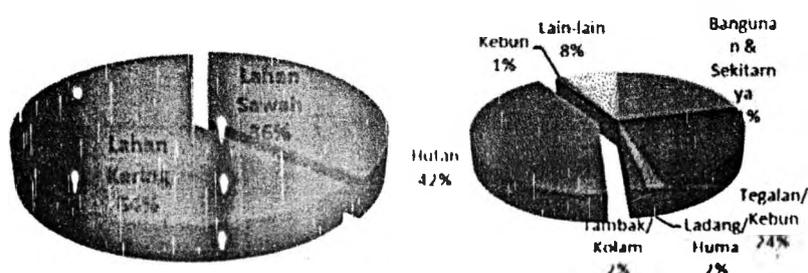
²Profil Kabupaten Pemalang dilansir dari laman <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

³ Profil Kabupaten Pemalang dilansir dari laman <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

- Jenis tanah Litosol dan kompleksnya, terdapat di kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- Jenis Latosol dan asosiasinya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.⁴

Temperatur Kabupaten Pemalang tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, berkisar antara 30°C dengan rata-rata curah hujan selama 1 tahun sebesar 302 mm. Curah hujan tertinggi berada pada Bulan Januari yaitu 739 mm, sedangkan curah hujan terendah berada di Bulan Juli, yaitu sebesar 47 mm.

Secara penggunaan lahan Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan lahan kering (64%) dan lahan sawah (36%).⁵ Kawasan lahan kering terbagi lagi menjadi kawasan hutan, kebun, ladang dan tambak. Persebaran kawasan ini cenderung berada di wilayah perkotaan Pemalang dan selatan Kabupaten Pemalang. Di wilayah Kabupaten Pemalang, terdapat tiga jenis rawan bencana, yaitu rawan bencana berupa gerakan tanah, rawan bencana erosi, dan rawan bencana genangan air yang terjadi disaat musim penghujan saja. Kawasan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, curah hujan dan kelereng yang ada di Kabupaten Pemalang.



Gambar B.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang⁶

Dari dominasi penggunaan lahan tersebut dapat terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang ditopang oleh keadaan alam Kabupaten Pemalang. Pertanian yang terdapat di Kabupaten Pemalang terbilang cukup melimpah. Data Kabupaten Pemalang dalam angka tahun 2017 menunjukkan bahwa:

⁴ Jenis Tanah Kabupaten Pemalang yang dilansir dari laman http://sitw.bappedapemalang.info/content.php?query=topografi&top=fisik_alam

⁵ Kabupaten Pemalang dalam Angka tahun 2017

⁶ Dilansir dari laman http://sitw.bappedapemalang.info/content.php?query=penggunaan_lahan

- **Tanaman Pangan**

Pada Tahun 2016 produksi padi sawah naik sebesar 26,97 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan produksi padi ladang meningkat sebesar 43,8 persen. Hal ini sejalan dengan rata-rata produksi yang meningkat cukup signifikan. Secara umum luas panen, produktivitas perhektar dan produksi tanaman palawija di Kabupaten Pemalang tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Hortikultura**

Rata-rata produksi tanaman hortikultura di tahun 2016 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Rata-rata produksi yang paling besar adalah tanaman petsai/sawi dengan angka rata-rata produksi per pohon selama tahun 2016 untuk tanaman buah-buahan secara keseluruhan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2015. Komoditas buah mangga merupakan produksi 247.388 ton pada tahun 2016.

- **Perkebunan**

Jenis perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Pemalang adalah teh dengan total area mencapai 524,75 Ha dan total produksi sebesar 925,25 ton pada tahun 2016. Produksi perkebunan andalan lainnya adalah Tebu, Kelapa Sayur, Glagah Arjuna, Cengkeh, Kopi, Tembakau, Kakao, Lada, Nilam, dan Karet tumbuh subur di kabupaten ini.

- **Peternakan**

Jenis peternakan yang diusahakan di Kabupaten Pemalang antara lain sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kerbau, kuda, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik, burung puyuh, burung dara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, populasi ternak kambing dan domba pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 0,2 persen. Jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 yang terbanyak adalah ayam bukan ras dan yang terkecil adalah kerbau, demikian juga jumlah daging hasil pemotongan yang terbesar jumlahnya adalah ayam bukan ras dan yang terkecil adalah kerbau. Produksi telur (ayam ras, ayam buras, itik dan burung puyuh) tahun 2016 tercatat sekitar 9,2 ribu ton, naik sebesar 42 persen dari produksi tahun sebelumnya. Produksi susu sapi tahun 2016 sebesar 1.915 liter mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- **Perikanan**

Sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya (tambak, sawah, kolam, karamba) dan perairan umum (waduk, sungai, telaga dan rawa). Salah satu produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan laut pada tahun 2016 adalah Jenis Pelagis, Demersal dan Ikan lainnya dengan jumlah produksi total sebanyak 19.267.527 kg. Pada tahun 2016, produksi usaha budidaya perikanan darat di tambak yang terbesar adalah bandeng yaitu sekitar 8.339.335 kg dengan sentra produksi terdapat di kecamatan Ulujami.

B. Analisis Kesiapan Struktur Daerah

Struktur daerah dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan *smart city*. Struktur daerah perlu mengkaji beberapa aspek, seperti sumber daya manusia (*people*), sumber daya pemerintah daerah (*managerial*), dan kapasitas keuangan daerah (*capital*).

1. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

Analisis kualitas sumber daya manusia dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat dalam menerima konsep *smart city*. Berdasarkan berbagai kajian, kualitas masyarakat dapat dilihat dari:

- a. Kondisi demografi kependudukan, yakni komposisi jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan kelompok umur penduduk produktif
- b. Pendidikan, meliputi rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni
- c. Tingkat kesehatan masyarakat, yang dapat diukur dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi AKI/AKB), Angka Usia Harapan Hidup (AHH) dan persentase balita kurang gizi
- d. Tingkat pendapatan masyarakat, yang dapat diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan
- e. Kesempatan kerja
- f. Indek kebahagiaan

Tabel 4 Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah Komunitas Minat Bakat/Hobi/Kreatif di Daerah	>10	√		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
2	Adanya Komunitas Pengembang/Developer Perangkat Lunak TIK di Daerah	Ada	√		
3	Adanya Digital <i>Startup</i> di Daerah	Ada	√		
4	Adanya Perguruan Tinggi di Daerah	Ada, 3 Perguruan Tinggi	√		
5	Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada			√
6	Jumlah Tindakan Pelanggaran Ketertiban Umum dalam Satu Tahun	5		√	
7	Jumlah Angka Kriminalitas dalam Satu Tahun	267 Kasus		√	
8	Jumlah Tindakan Perusakan Fasilitas Umum dalam Satu Tahun	3		√	
9	Jumlah Kegiatan Tawuran Antar Kelompok Warga dalam Satu Tahun	Ada Kegiatan Tawuran Tahun 2016 ditekan 100%		√	

Sumber : Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *smart city*. Salah satu kinerja penilaian kesiapan kualitas sumber daya pemerintahan adalah adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak *smart city*, kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan *smart city* merupakan faktor kunci keberhasilan program *smart*

city. Analisis terhadap kualitas sumber daya pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 5 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Kategori		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Pegawai dengan Jenjang Pendidikan S2 Ke Atas	0,5% pada tahun 2016 ⁷			√
2	Jumlah Pegawai dengan Latar Belakang Pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	112	√		
3	Jumlah Relawan TIK di Daerah	30 orang pada tahun 2005		√	
4	Persentase Jumlah Unit Komputer (PC & Laptop) Terhadap Jumlah Pegawai	78%	√		
5	Persentase Pegawai Berusia 50 Tahun Ke Atas Terhadap Jumlah Pegawai	45,9% ⁸		√	
6	Persentase Pegawai Berusia 40 - 50 Tahun Terhadap Jumlah Pegawai	33,86%		√	
7	Persentase Pegawai Berusia 25 - 40 Tahun Terhadap Jumlah Pegawai	20,22%		√	
8	Jumlah Sistem Informasi yang Digunakan di Pemerintah Daerah	59		√	

⁷ Buku data kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016

⁸ Buku data kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 dan diambil dari laman <http://182.253.108.19/simpeg/login>

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
9	Persentase Ketersediaan Jaringan Broadband Access Terhadap Jumlah Kantor Pemerintahan	92%	√		
10	Persentase Ketersediaan Jaringan LAN/WAN di Kantor Pemerintahan	70%	√		
11	Jumlah Lokasi Wireless Internet (Hotspot) di Kawasan Perkantoran Pemerintahan	28	√		
12	Ketersediaan Data Center (Baik yang Dikelola Sendiri Maupun <i>Managed Service</i>) Untuk Kepentingan Pemerintahan	Ada	√		
13	Ketersediaan Rencana dan SOP Mitigasi Bencana Terhadap Data Pemerintahan	Ada	√		
14	Ketersediaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Interoperabel	Ada	√		
15	Ketersediaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Interoperabel	Ada	√		
16	Ketersediaan Sistem Informasi Kantor Virtual Pemerintah Daerah yang Interoperabel	Ada	√		
17	Ketersediaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Interoperabel	Ada	√		
18	Ketersediaan Sistem Informasi Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang Interoperabel	Ada	√		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
19	Ketersediaan Sistem Informasi Pengelolaan Legislasi Daerah yang Interoperabel	Ada	√		
20	Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Interoperabel	Ada	√		

Sumber : Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

3. Analisis Kualitas Sumber Daya Keuangan

Analisis kualitas keuangan pemerintah merupakan aspek yang melihat jumlah sumber daya keuangan dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang. Sumber daya keuangan dapat meliputi kemungkinan dana dari APBD atau dari sumber lain dengan mekanisme tertentu. Analisis kualitas keuangan pemerintah dapat dilihat melalui isian berikut ini:

Tabel 6 Analisis Kualitas Sumber Daya Keuangan

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah, Terhadap Total Pendapatan Daerah	11,78 % (Per Maret)		√	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	Rp.54.172.076.000		√	
3	Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah	49,89%		√	
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Total Belanja Daerah	16,92%		√	

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
5	Jumlah Anggaran Untuk Belanja <i>Smart City</i> yang Dapat Dialokasikan di Dalam APBD Tahun 2017	6.178.000.000 (Anggaran Diskominfo)	√		
6	Jumlah Anggaran Untuk Belanja <i>Smart city</i> Yang Dapat Dialokasikan di Dalam APBD Tahun 2018	4.152.500.000	√		
7	Jumlah Program Pembangunan Untuk Mendukung <i>Smart city</i> di Daerah	5		√	
8	Nilai Investasi Masuk yang Mendukung Pembangunan Daerah	19.712.000.000		√	
9	Jumlah Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan Alternatif yang Dapat Digunakan Untuk Mendukung <i>Smart City</i>	4	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

C. Analisis Kesiapan Infrastruktur Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur daerah dilakukan dengan melihat tiga aspek, yakni infrastruktur fisik, infrastruktur digital dan infrastruktur sosial daerah.

1. Analisis Infrastruktur Fisik

Analisis infrastruktur fisik bertujuan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Pemalang. Melalui analisis infrastruktur fisik, pemerintah akan mengetahui kondisi infrastruktur fisik yang telah dimiliki oleh Kabupaten Pemalang serta dapat memperkirakan pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan untuk mendorong tercapainya *Smart City*. Analisis infrastruktur fisik

Kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan melihat kondisi infrastruktur jalan, pedestrian, penerangan jalan umum, kondisi rambu & penunjuk jalan, ketersediaan kawasan perkantoran untuk bisnis, kawasan perbelanjaan, serta kondisi sarana pendidikan dan kesehatan. Analisis infrastruktur fisik dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 7 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai / Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	87,14%	√		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	73%	√		
4	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	100%	√		
5	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	36,02%			√
6	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada	√		
7	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Ada	√		
8	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	71,45%		√	
9	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	90%	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

2. Analisis Infrastruktur Digital Daerah

Analisis infrastruktur digital penting dilakukan mengingat pengembangan *smart city* tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur digital. Ketersediaan infrastruktur

digital yang memadai di Kabupaten Pemalang akan mampu memberikan percepatan capaian dari pengembangan *smart city*. Pemerintah Kabupaten Pemalang akan dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur digital yang dinilai masih kurang apabila menggunakan analisis ini. Analisis infrastruktur digital dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 8 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			baik	sedang	buruk
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	30%			√
2	Tersedianya jaringan <i>broadband access</i> untuk masyarakat	Ada	√		
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	3 Titik			√
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	100% ⁹	√		
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	7 jam (satu kali)		√	
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	353		√	
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	3	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial daerah menggambarkan akses terhadap fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Pemalang. Infrastruktur sosial sendiri terdiri dari

⁹ Dilansir dari laman <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

ruang terbuka publik, fasilitas olahraga dan balai warga. Analisis infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 9 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No	Komponen	Nilai / Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan / desa	Ada	√		
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Ada	√		
3	Adanya aula / balai warga di tingkat kelurahan / desa	Ada	√		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan / desa	Ada	√		
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Ada	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

D. Analisis Kesiapan Suprastruktur

1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Secara umum, Kabupaten Pemalang memiliki banyak urusan yang masih harus dipersiapkan peraturan/kebijakannya. Hingga saat ini (Juli, 2018) baru terdapat rancangan peraturan Kepala daerah tentang pelaksanaan *e-Government*. Analisis kesiapan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 10 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No	Komponen	Nilai/ Komisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Peraturan Daerah Tentang Dewan <i>Smart city</i> Daerah	Ada	√		
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah Tentang Tim Pelaksana <i>Smart city</i> Daerah	Ada	√		
3	Adanya <i>Master Plan Smart city</i> Daerah	Sedang disusun		√	
4	Adanya Peraturan Daerah Tentang <i>Master Plan Smart city</i> Daerah	Tidak ada			√
5	Adanya Visi Pembangunan <i>Smart city</i> Yang Selaras Dengan Visi Misi Pembangunan Daerah	Ada	√		
6	Adanya Kepastian Terhadap Keberlanjutan Program <i>Smart city</i> dalam Jangka Panjang	Ada	√		
7	Adanya Mekanisme Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Terhadap Aparatur Dan Organisasi Yang Berprestasi Dalam Melaksanakan Program <i>Smart city</i>	Tidak ada			√

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Analisis kesiapan kelembagaan daerah berkaitan dengan pembentukan dewan *smart city* Kabupaten Pemalang. Analisis kesiapan kelembagaan dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel B.10 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Tabel 11 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan <i>Smart city</i> Daerah	Ada	√		
2	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart city</i> Daerah	Ada	√		
3	Adanya SOP <i>Smart city</i> Daerah	Belum ada			√
4	Adanya Tata Pamong yang Bertugas Sebagai Anggota Tim Pelaksana <i>Smart city</i> di Setiap OPD	Ada	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah berkaitan dengan dukungan masyarakat dalam pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang. Analisis kesiapan organisasi masyarakat daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 12 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Lembaga Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi di Daerah	Tidak ada			√
2	Adanya Forum-Forum Swadaya Masyarakat Pendukung <i>Smart city</i>	Tidak ada			√

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
3	Jumlah Forum Swadaya Masyarakat Pendukung <i>Smart city</i>	Tidak ada			√
4	Dukungan Operasional Pemerintah Terhadap Forum Pendukung <i>Smart city</i>	Ada	√		
5	Jumlah Forum Pendukung <i>Smart city</i> Yang Memiliki Sekretariat Definitif	3		√	
6	Adanya Partisipasi Pakar dari Perguruan Tinggi Lokal Dalam Dewan <i>Smart city</i> Daerah	Ada	√		

Sumber: Analisis Penyusun

* Penilaian Interpretasi Bersifat Kualitatif berdasarkan persepsi tim pelaksana *smart city*

E. Analisis Kesiapan Culture

Budaya Kerajaan Mataram berpengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan pada Kabupaten Pemalang. Berikut tinjauan budaya yang ada di Kabupaten Pemalang dari berbagai aspek:

- **Tradisi**

Baritan atau sedekah laut merupakan tradisi menghanyutkan Jolen ke tengah laut yang dilaksanakan oleh nelayan sebagai tanda syukur akan hasil tangkapan laut mereka. Baritan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maulud, tepatnya pada Selasa atau Jumat Kliwon. Sebelum melakukan penghanyutan Jolen, diadakan tirakatan yang dihadiri oleh nelayan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain baritan, terdapat juga kesenian Krangkeng yang merupakan kesenian tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat pemalang sejak tiga abad silam. Materi yang ditampilkan dari kesenian krangkeng adalah berbagai jenis ketangkasan seperti atraksi kekebalan tubuh dan keterampilan akrobatik. Sampai saat ini kesenian krangkeng menjadi sebuah tontonan yang menarik.

- **Bela Diri**

Bela diri Kuntulan mulai dikenal masyarakat pemalang pada abad 20 yaitu saat di tanah air banyak muncul pergerakan kebangsaan. Maka dibentuklah perkumpulan beladiri, khususnya pencak silat. Kegiatan bela diri ini diiringi rebana dan pukulan bedug serta dikumandangkan doa-doa sholawat Nabi sehingga terkesan sebagai kegiatan kesenian dan keagamaan.

- **Seni Tari**

Seni tari tradisional yang masih ada di kabupaten Pemalang salah satunya ialah tari Sintren. Sintren merupakan kesenian rakyat yang populer di Keresidenan Pekalongan khususnya pada masyarakat Pantura. Sintren menggambarkan perjalanan hidup dan kesucian seorang gadis yang diperankan oleh seorang gadis belia yang masih suci, belum aqil baligh dan belum terjamah tangan lelaki.

- **Kuliner**

Kabupaten Pemalang memiliki kuliner yang khas diantaranya ialah Sate Loso, Nasi Grombyang, Kepiting Gemes, Apem Comal, Kamir Pemalang dan aneka masakan hasil laut. Salah satunya ialah nasi grombyang yang merupakan sejenis nasi campur yang sangat populer di Kota Pemalang. Nama grombyang berasal dari Bahasa Jawa, yaitu *grombyang-grombyang* yang artinya bergoyang-goyang, dinamakan demikian karena perpaduan antara kuah dan nasi lebih banyak kuahnya sehingga kelihatan bergoyang-goyang.

- **Karakter Khas Budaya Pantura**

Selama berabad-abad pantura merupakan jalur perdagangan dan transportasi utama yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa. Daerah ini merupakan perlintasan utama bagi masyarakat dari berbagai suku dan budaya yang melakukan perjalanan baik lewat jalur darat maupun laut. Hal ini ikut berperan dalam membentuk karakter masyarakat Pemalang. Masyarakat Pemalang terbiasa dengan perbedaan dan keberagaman suku, budaya, bahasa maupun ras. Masyarakat Pemalang juga sangat terbuka dengan perubahan. Karakter ini merupakan modal yang sangat kuat dalam membuat terobosan-terobosan inovasi dalam membangun Kabupaten Pemalang sebagai daerah pintar.

BAB III

Analisis Kesenjangan

A. Analisis SWOT Kesiapan Nature dan Culture

Tabel 13 Analisis Swot Aspek Nature dan Culture

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Pariwisata: Wisata alam, budaya, religi yang beragam2. Pengembangan desa wisata3. Pertanian menjadi potensi ekonomi yang paling besar.4. Dilewati oleh jalur utama yaitu Jalur Pantura dan Jalan Tol Pejagan Pemalang dan Batang Pemalang	<ol style="list-style-type: none">1. Destinasi wisata yang belum dikelola dengan baik2. Budaya masyarakat yang belum menjaga lingkungan3. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung belum optimal.
Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah wisatawan yang lokal dan international yang meningkat	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis wisata sejenis dan pengelolaannya lebih baik di daerah lain

Kabupaten Pemalang telah memiliki kondisi alam dan budaya cukup baik, namun perlu untuk dikembangkan dalam aspek. Terdapat beberapa peluang dan tantangan kedepannya seperti meningkatkan wisatawan internasional serta persaingan pariwisata antar daerah.

Dalam menghadapi hal ini perlu adanya strategi untuk mengatasinya. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan promosi wisata daerah, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pariwisata, melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaana wisata, dan menjalin kerjasama pembentukan paket wisata antar daerah.

B. Analisis SWOT Kesiapan Struktur

Tabel B.4. Analisis SWOT Kesiapan Struktur

Tabel 14 Analisis Swot Aspek Struktur

<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah SDM usia produktif yang cukup tinggi, terutama pada bidang kejuruan2. Kelengkapan tata kelola pemerintahan yang baik telah cukup3. Tumbuhnya komunitas-komunitas yang peduli dengan kota seperti komunitas pariwisata, UMKM, dll.4. Rendahnya angka kriminalitas	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang rendah2. Masih rendahnya PAD daerah3. Banyaknya migrasi lulusan perguruan tinggi ke luar daerah Pemalang
<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya mekanisme pendanaan melalui KPBU2. Adanya Potensi Kerjasama dengan berbagai Pihak	<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none">1. Banyaknya bisnis digital dari luar daerah yang masuk ke pemalang2. Banyaknya sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Melalui analisis SWOT tersebut dirumuskan berberbagai strategi diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek digital. Pemerintah Kabupaten Pemalang tentunya perlu untuk mengembangkan beragam alternatif sumber pendapatan daerah agar mampu lebih mandiri.

C. Analisis SWOT Kesiapan Infrastruktur

Tabel 15 Analisis Swot Aspek Infrastruktur

<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas sarana dan prasarana sosial sudah tersedia baik.2. Infrastruktur Fisik yang secara umum sudah baik	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jaringan internet belum merata dan terkoneksi di seluruh wilayah.2. Ruang publik belum sepenuhnya terkoneksi internet oleh <i>wifi</i>.3. Infrastruktur digital yang masih dapat dioptimalkan4. Aplikasi yang belum terintegrasi dan terinteroperabilitas
---	---

Peluang	Tantangan
1. Perkembangan Teknologi yang pesat.	1. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center 2. Adanya ancaman kejahatan internet

Kondisi Infrastruktur Kabupaten Pemalang dapat ditinjau melalui table Analisis SWOT diatas. Dari hasil analisis tersebut perlu beberapa kebijakan diantaranya adalah meningkatkan integrase dan interoperabilitas dari sistem yang sudah ada. Selain itu perlu adanya peningkatan terhadap infrastruktur digital, sosial dan ekonomi untuk menunjang pelaksanaan smart city.

D. Analisis SWOT Kesiapan Suprastruktur

Tabel 16 Analisis Swot Aspek Suprastruktur

Kekuatan 1. Memiliki Dewan dan Tim Pelaksana Smart city. 2. Ada komitmen dan dukungan Kepala Daerah	Kelemahan 1. Belum Adanya SOP Smart city Daerah
Peluang 1. Kerjasama dengan berbagai pihak	Tantangan 1. Adanya kebijakan nasional yang berubah

Kondisi suprastuktur Kabupaten Kabupaten Pemalang secara umum sudah cukup baik. Namun perlu adanya beberapa strategi dalam pengembangan smart city ini diantaranya adalah penyusunan kebijakan smart city, penguatan kelembagaan smart city dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

E. Analisis Gap atau Kesenjangan.

Analisis gap atau kesenjangan merupakan tinjauan kaitan serta kesesuaian antara masa depan (*future state*), permasalahan, serta strategi pembangunan daerah. Pada analisis kesenjangan ini akan dipaparkan mengenai gap yang terjadi pada 6 aspek *smart city* dan strategi yang diarahkan untuk mencapai kondisi masa depan.

1. Smart Governance

Tabel 17 Analisis Gap aspek Smart Governance

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan tata kelola pemerintah daerah berbasis teknologi• Keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat• Kemudahan akses data dalam pengambilan kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan satu data masih dikembangkan• Sistem informasi kebijakan sudah mulai dikembangkan• Penggunaan media sosial pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi dan pelayanan publik• Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik• Meningkatkan partisipasi publik.

Seperti yang dipaparkan tabel C.1, Dari aspek *smart governance* terdapat gap antara kondisi masa depan dan kondisi saat ini. Yang pertama dari aspek tata kelola pemerintahan. Tren perkembangan saat ini adalah adanya tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi. Baik dari segi pelayanan manajemen birokrasi, maupun pengambilan kebijakan mampu untuk lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan informasi. Sejauh ini Kabupaten Pemalang telah mulai mengembangkan *e-government* dan berbagai aplikasi yang digunakan untuk

menunjang pelayanan kepada masyarakat. Dari hal tersebut akan dirumuskan beragam strategi dan program yang melingkupi pengembangan *smart governance* seperti diantaranya adalah pengembangan *e-government*.

2. Smart Branding

Tabel 18 Analisis Gap *Smart Branding*

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan persaingan usaha lokal dan luar daerah• Peningkatan jumlah wisatawan lokal dan luar• Perkembangannya spesifikasi produk sebagai <i>branding</i> Kabupaten Pemalang	<ul style="list-style-type: none">• Masih banyak potensi wisata yang belum dikembangkan• Citra kota yang belum kuat• Bisnis lokal yang masih belum berkembang• Sudah mulai ada perkembangan citra produk lokal	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan ekosistem investasi dan pariwisata yang mudah dan efektif• Mengembangkan Citra kota (<i>city appearance</i>) dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul di Kabupaten Pemalang,

Aspek *smart branding* di Kabupaten Pemalang memiliki beberapa kesenjangan antara kondisi masa depan dan kondisi saat ini. Gap tersebut diantaranya misalnya potensi persaingan usaha di masa depan dengan luar daerah sementara saat ini iklim usaha di Kabupaten Pemalang belum terlalu berkembang. Dari hal tersebut perlu beberapa strategi untuk mendorong hasil tersebut. Diantaranya pengembangan pariwisata unggulan dan pembangunan citra Kabupaten Pemalang.

3. Smart Economy

Tabel 19 Analisis Gap Smart Economy

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">Berkembangnya Pertanian Sebagai Leading Sector berbasis AgropolitanJumlah Penduduk yang meningkatBerkembangnya Ekosistem Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none">Sektor basis berupa pertanianKeberadaan Jalan Toll sebagai Potensi pendukung IndustriIklim transaksi digital yang belum berkembangTingkat pengangguran Tertinggi no 6 di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none">Membangun ekosistem ekonomi digital melalui transaksi nontunaiMeningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, agrominapolitan dan produk unggulan daerahPengembangan kerjasama dengan para pelaku usaha

Aspek *smart economy* di Kabupaten Pemalang didorong untuk mencapai pengembangan ekonomi lokal di daerah tersebut. Kondisi masa depan yang akan muncul adalah tren perkembangan pertanian sebagai sektor basis (*leading sector*) dan meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi yang ada saat ini diantaranya adalah pengangguran yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Tengah serta sektor basis pertanian yang belum optimal. Strategi yang harus disusun diantaranya adalah optimalisasi pengembangan sektor pertanian, dalam hal ini bisa berupa penggunaan teknologi dalam pengolahannya. Selain itu aspek permodalan yang harus dipersiapkan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan.

4. Smart Living

Tabel 20 Analisis Gap Smart Living

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">• Perkembangan Kebutuhan Transportasi antar daerah• Kebutuhan Peningkatan fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Belum meratanya fasilitas kesehatan• Belum Berkembanya sarana transportasi• Proyeksi kemandirian pangan yang terancam	<ul style="list-style-type: none">• Memerataan cakupan dan kualitas pelayanann kesehatan dan sosial• Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi barang dan jasa• Peningkatan kuelitas penanganan bencana alam

Aspek Smart living di Kabupaten Pemalang memiliki beberapa gap antara kondisi masa depan dan kondisi saat ini. Poin utamanya adalah gap antara kebutuhan transportasi dan aspek kesehatan yang diinginkan semakin baik dan semakin baik. Sehingga perlu pengembangan sektor kesehatan, pangan dan keterhubungan.

5. Smart Society

Tabel C.5 Analisi Gap aspek Smart Society

Tabel 21 Analisis Gap Smart Society

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan• Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya Komunitas peduli dengan Pemalang• Masih adanya tawuran dan tindak pidana yang terjadi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan• Mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang peduli terhadap isu strategis Kabupaten Pemalang• Mengembangkan literasi

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
		digital masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan luar sekolah

Secara umum target yang ingin dicapai adalah terus meningkatnya keamanan masyarakat dan kualitas pendidikan yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas, baik bagi sarana pendidikan maupun dari segi transportasi publik. Hal ini juga sudah termuat dalam rencana pembangunan. Salah satunya adalah dengan pengembangan lebih lanjut terminal di Kabupaten Pemalang.

6. Smart Environment

Tabel 22 Analisis Gap Smart Environment

Kondisi Masa Depan	Kondisi Saat Ini	Strategi
<ul style="list-style-type: none">• Penjaminan 19.619,688 Ha Hutan Lindung• Kebutuhan RTH dan Udara yang baik untuk masyarakat• Tata kelola energi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian tata ruang yang masih belum optimal• Daya tampung pengelolaan sampah yang masih belum menampung proyeksi timbunan sampah• Sudah mulai ada pengelolaan energi berbasis biogas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.• Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi ramah lingkungan• Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam• Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, berkelanjutan dan harmonis antara kawasan permukiman dan kawasan industri

Kondisi yang ingin dicapai di masa depan dari aspek lingkungan adalah terdapatnya kawasan lindung yang harus dikonservasi, kebutuhan RTH yang baik seiring perkembangan jumlah penduduk, serta pengelolaan energi yang lebih

berkelanjutan. Sedangkan posisinya saat ini adalah pengendalian tata ruang yang belum optimal, daya tampung TPA yang masih rendah, namun sudah mulai adanya pengelolaan energi berbasis biogas di beberapa desa. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk mencapai hal tersebut diantaranya adalah dengan menegakan aturan tata ruang dan lingkungan hidup yang konsisten. Selain itu pengembangan teknologi ramah lingkungan sebagai bentuk kemandirian energi juga perlu dikembangkan lebih lanjut.

BAB IV

Analisis Visi Pembangunan *Smart City*

A. Sasaran Smart City

1. Smart Governance

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart governance* di dalam dimensi *smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis (*business process*) yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

- a. Pelayanan Publik (*Public Service*)
- b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)
- c. Efisien Kebijakan Publik (*Public Policy*)

2. Smart Branding

Domain *smart branding* merupakan istilah yang digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkung lokal, nasional maupun internasional.. *Smart branding* adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan produk suatu daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Sasaran dari domain *smart branding* dari Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Branding Pariwisata
- b. Branding Investasi dan Usaha Lokal
- c. Citra Kota

3. Smart Economy

Domain *smart economy* menggaris bawahi yang berkaitan dengan tata kelola perekonomian. Domain ini lebih menitikberatkan perwujudan ekosistem



berekonomian di daerah yang selaras dengan sektor unggulan daerah sehingga dapat memenuhi tantangan di era informasi yang disrupsi dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. Berikut ini adalah rumusan sasaran yang ada pada domain *smart economy* di Kabupaten Pemalang:

- a. Membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berdaya saing terutama pada sektor pertanian.
- b. Membangun ekosistem keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Smart Living

Domain dari *smart living* menitikberatkan pada komponen mendukung kehidupan yang layak. Kualitas hidup dan juga komponen kebudayaan masyarakat merupakan komponen yang penting dalam mempengaruhi dalam *smart city* seperti tersedianya kebutuhan-kebutuhan akan rasa keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan hidup. Sasaran *smart living* berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pemalang:

- a. Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah
- b. Mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana transportasi
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

5. Smart Society

Domain *smart society* berfokus pada sosial masyarakat sebagai unsur sebuah kota. Manusia merupakan modal utama dari sosial masyarakat, maka dari itu sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud dalam individu dan komunitas-komunitas yang berdaya saing dan kreatif. Modal sosial masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini diterapkan dengan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, dengan meningkatnya peran sosial masyarakat maka menguat pula keserasian masyarakat dengan lingkungan. Nilai yang tertanam seperti inilah yang perlu dipertahankan dalam pengembangan konsep *smart city*. Maka dari itu berikut ini adalah sasaran dari *smart society* Kabupaten Pemalang.

- a. Mewujudkan komunitas fisik dan digital yang efisien
 - b. Mewujudkan ekosistem belajar yang efisien
- Mewujudkan sistem keamanan masyarakat

6. Smart Environment

Domain *smart environment* merupakan domain lingkungan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta keindahan lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman. Sasaran dari domain Smart Environment adalah;

- a. Mengembangkan pembangunan yang peduli pada aspek lingkungan
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah yang efektif dan efisien
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab

B. Analisis Visi Pembangunan *Smart city*

1. Analisis Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang

Analisis visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dilakukan dengan meninjau visi daerah yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016.

Tabel 23 Analisis Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang

Komponen	RPJM Daerah	RPJP Daerah	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMN
Visi	TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA	"KABUPATEN PEMALANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"	"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI" Mboten Korupsi Mboten Ngapusi	TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Misi 1	Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam	(Misi 1) mewujudkan kualitas sumber daya manusia	(Misi 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat	(Misi 2) Mewujudkan masyarakat maju,

Komponen	RPJM Daerah	RPJP Daerah	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMN
	<p>pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.</p>	<p>yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah</p>	<p>dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;</p>	<p>berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum</p>
Misi 2	<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.</p>	<p>(Misi 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah</p>	<p>(Misi 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat</p>	<p>(Misi 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</p>
Misi 3	<p>Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan</p>	<p>(Misi 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah,</p>	<p>(Misi 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran</p>	<p>(Misi 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>

Komponen	RPJM Daerah	RPJP Daerah	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMN
	dan pengangguran.			
Misi 4	Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.	(Misi 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	(Misi 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.	(Misi 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Misi 5	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.	(Misi 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum	(Misi 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;	(Misi 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian

Komponen	RPJM Daerah	RPJP Daerah	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMN
				Indonesia sebagai negara kepulauan.
Misi 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , pe tegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.	(Misi 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur	(Misi 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”	(Misi 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Misi 7	Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.	-	(Misi 1) Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;	(Misi 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Tabel diatas merupakan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang yang diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah dan nasional. Dalam Visi RPJMD, RPJPD Kabupaten Pemalang, RPJMD provinsi Jawa

Tengah menunjukkan bahwa pembangunan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri menggunakan potensi lokal yang ada.

Misi pertama pembangunan Kabupaten Pemalang selaras dengan misi pertama yang tertuang dalam RPJMD provinsi Jawa Tengah dan pada misi kelima yang memaksimalkan aspirasi masyarakat dalam melibatkan proses pembangunan berdasarkan azas gotong royong dan musyawarah mufakat. Misi tersebut juga selaras dengan misi pertama di RPJPD Kabupaten Pemalang. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bereksistensi dalam pembangunan daerah maka masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya proses perencanaan yang *top-down* dan *bottom-up* sesuai dengan misi pertama RPJMN yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Misi kedua dalam pembangunan Kabupaten Pemalang berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan. Misi tersebut selaras dengan misi pertama pada RPJPD Kabupaten Pemalang yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Dalam RPJMD provinsi Jawa Tengah dalam misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut akan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera sesuai dengan misi keempat RPJMN.

Misi ketiga RPJMD Kabupaten Pemalang berfokus pada peningkatan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal yang selaras dengan misi kedua RPJPD Kabupaten Pemalang yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Misi tersebut juga selaras dengan RPJMD provinsi Jawa Tengah yaitu membangun ekonomi daerah yang memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan terbangunnya ekonomi daerah maka akan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sesuai tujuan misi dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Pemalang serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing sesuai dengan misi ketiga RPJMN.

Misi keempat RPJMD Kabupaten Pemalang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis pada kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Misi ini sesuai dengan misi keempat pada RPJPD Kabupaten Pemalang serta misi keenam dan ketujuh RPJMD provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mempercepat pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut akan

mewujudkan kualitas hidup masyarakat menjadi maju dan sejahtera sesuai dengan misi keempat RPJMN dan Nawacita kelima Joko Widodo.

Misi kelima dalam pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati. Apabila misi ini tercapai maka akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai dan masyarakat yang berkepribadian berdasarkan budaya dan supremasi hukum yang ada yang sesuai pada misi keenam RPJPD Kabupaten Pemalang dan misi pertama RPJMN.

Misi keenam RPJMD Kabupaten Pemalang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan investasi daya saing daerah. Misi ini selaras dengan misi ketiga RPJPD kabupaten Pemalang yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) demokratis dan bertanggung jawab. Dalam RPJMD provinsi Jawa Tengah juga memiliki misi yang sesuai dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan jujur.

Misi ketujuh dalam RPJMD Kabupaten Pemalang berfokus pada pengembangan budaya lokal yang berlandaskan jatidiri masyarakat. Misi ini sesuai dengan misi pertama RPJMD provinsi Jawa Tengah yang berdaulat di bidang bidang kebudayaan serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan misi keenam RPJMN.

2. Analisis Visi dan Misi Pembangunan *Smart city* Kabupaten Pemalang

Visi *smart city* Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Pemalang 2016-2021, RPJM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, RPJM Nasional 2015-2019, agenda prioritas pembangunan pemerintah pusat, harapan warga masyarakat, dan pernyataan kepala daerah Kabupaten Pemalang. Visi Pembangunan *smart city* Kabupaten Pemalang adalah:

"PEMALANG CERDAS YANG MUDAH, NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN"

Pemalang Cerdas menggambarkan arah pencapaian utama dari program *Smart City* Kabupaten Pemalang. **Mudah** merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana terdapat kemudahan pelayanan, kemudahan pergerakan, kemudahan dalam membangun usaha dan kemudahan-kemudahan lainnya. **Nyaman** artinya Kabupaten Pemalang menjadi lingkungan tempat tinggal yang mendukung aktualisasi diri serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas,

konektivitas, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan akan kepuasan diri dan kebahagiaan. **Berkelanjutan** merefleksikan komitmen pemanfaatan sumberdaya yang bertanggung jawab, bijaksana, dan menjamin keberlanjutan melalui upaya perlindungan, pemeliharaan serta pengayaan nilai keanekaragaman yang ada.



MASTERPLAN

SMART CITY KABUPATEN PEMALANG
Tahun 2018 - 2028

BUKU II

(Masterplan Smart City Kabupaten Pemalang)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SAMBUTAN BUPATI PEMALANG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kabupaten Pemalang akan selalu berbenah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi segenap masyarakat. Melalui konsep *smart city*, Kabupaten Pemalang mencoba mengakselerasi perbaikan pelayanan publik sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fokus *smart city* Kabupaten Pemalang, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berfokus pada peningkatan potensi ekonomi, sosial, dan budaya.

Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Pemalang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun strategi maupun arahan pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang yang terbagi ke dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Buku ini disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang agar pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang dapat sesuai dengan harapan, keinginan, dan cita-cita seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat.

Konsep pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Pemalang telah diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada. Oleh karena itu, *smart city* Kabupaten Pemalang akan dikembangkan dengan menghadirkan ciri khas dan karakter unik yang melekat pada Kabupaten Pemalang. Kehadiran konsep *smart city* yang akan dikembangkan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat turut serta mewujudkan Kabupaten Pemalang yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pemalang, Oktober 2018

Bupati Pemalang

H. Junaedi, S.H., MM.

SAMBUTAN DEWAN SMART CITY

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Kami atas nama Dewan *Smart City* Kabupaten Pemalang mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Pemalang. Bantuan seluruh pihak dalam penyusunan Buku Masterplan *Smart City* telah memberikan keluasan sekaligus kekhasan konsep pengembangan *smart city* yang akan diterapkan di Kabupaten Pemalang.

Sebagai salah satu wilayah yang berada di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), Kabupaten Pemalang memiliki kondisi wilayah yang sangat dinamis. Perubahan demi perubahan terjadi seiring dengan perkembangan wilayah di sekitar Kabupaten Pemalang. Perkembangan strategi pembangunan nasional juga turut serta dalam mempengaruhi dinamika perubahan di Kabupaten Pemalang. Respon yang cepat atas perubahan yang cepat tersebut perlu dilakukan agar Kabupaten Pemalang tetap bisa bersaing dengan wilayah sekitar maupun bersaing secara nasional.

Konsep *smart city* hadir menjadi *enabler* untuk merespon dinamika perubahan yang terjadi. Tanpa mengurangi nilai-nilai sosial, budaya, dan adat dari wilayahnya, penerapan konsep *smart city* memberikan dorongan untuk mempercepat perbaikan maupun pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang. Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Pemalang menjadi wadah bagi segala program maupun inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pemalang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Pemalang, Oktober 2018

Ketua Dewan Smart City

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI PEMALANG	2
SAMBUTAN DEWAN SMART CITY	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud Dan Tujuan Masterplan	9
C. Landasan Hukum	10
D. Kerangka Pikir Smart city	16
BAB II VISI SMART CITY KABUPATEN PEMALANG	19
A. Visi Smart city	19
B. Sasaran <i>Smart city</i>	19
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	23
A. <i>Smart Governance</i>	23
B. <i>Smart Branding</i>	23
C. <i>Smart Economy</i>	24
D. <i>Smart Living</i>	25
E. <i>Smart Society</i>	25
F. <i>Smart Environment</i>	26
BAB IV RENCANA AKSI KESIAPAN SMART CITY	27
A. Rencana Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan <i>Smart City</i>	27
B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung <i>Smart city</i>	27

C. Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smar City</i>	28
D. Rencana Penguatan Literasi <i>Smart city</i>	28
BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	29
A. <i>Quick Wins</i>	29
BAB VI PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tren pembangunan suatu wilayah dihadapkan kepada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan ini hadir diantaranya sebagai hasil dari terjadinya fenomena revolusi digital, perubahan pola demografi, dan dinamika perubahan iklim. Di tengah derasnya arus perubahan daerah baik itu kota, kabupaten, maupun provinsi dituntut untuk mempersiapkan dan menyediakan sebuah ekosistem daerah yang menjamin peningkatan kualitas hidup dan mampu melindungi masyarakat dari efek deskruktif yang ada.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terus berkembang pesatnya populasi penduduk perkotaan dan transisi kehidupan masyarakat dari pola-pola kehidupan yang bersifat rural ke urban. PBB memprediksi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Hal ini akan menimbulkan beberapa permasalahan dan tantangan baru dalam pembangunan daerah. Misalnya mulai munculnya isu ketahanan pangan yang terancam, eksploitasi lahan terutama lahan pertanian menjadi lahan terbangun, mobilitas penduduk, dan beberapa isu permasalahan lainnya. Isu tersebut akan semakin meluas jika tidak direspon dengan pendekatan yang tepat.

Di lain hal, revolusi digital telah menyebabkan percepatan perkembangan teknologi secara eksponensial, mengakibatkan berubahnya cara dan gaya hidup manusia saat ini dan di masa depan. Revolusi ini terjadi bersamaan dengan hadirnya berbagai teknologi canggih seperti *big data*, *internet of things*, *artificial intelligence*, 5G, *blockchain*, dan yang paling familier bagi masyarakat adalah teknologi internet. Penggunaan internet merupakan salah satu hal yang mendorong terciptanya perpindahan informasi yang cepat, tepat dan akurat dari satu tempat atau satu kota ke kota lainnya. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan internet dari tahun ke tahun semakin

meningkat, berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 72,41% dan mayoritas didominasi oleh masyarakat *urban* yang tinggal dan berkeseharian di daerah perkotaan. Pemanfaatan internet sendiri saat ini tidak hanya sebagai media untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk melakukan transaksi, komunikasi, dan juga dimanfaatkan untuk berbisnis.

Dengan begitu beragamnya dinamika perkembangan yang terjadi, dibutuhkan pendekatan pembangunan kota yang bersifat komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang sedang berkembang adalah konsep kota cerdas. Pendekatan kota cerdas saat ini telah menjadi trend pembangunan kota atau daerah di seluruh dunia. Pendekatan kota cerdas tidak hanya mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi, melainkan juga tentang bagaimana membangun sebuah kota dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung terciptanya berbagai inovasi terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khas perkotaan.

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan menuju 100 *Smart city*. Pada tahun 2017 terpilih 25 Kabupaten/kota yang akan menjadi fokus untuk didampingi oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas. Program ini menargetkan tercapainya target 100 Kota/Kabupaten yang memiliki konsep dan perencanaan pembangunan kota cerdas sampai tahun 2019.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 50 kabupaten/kota terpilih pada tahun 2018 dalam Gerakan Menuju 100 *Smart city*. Pembangunan kota cerdas Kabupaten Pemalang mengarah kepada konteks penggalan potensi dan antisipasi masalah yang berpotensi hadir di masa yang akan datang. Masterplan kota cerdas Kabupaten Pemalang, diharapkan dapat menjadi wadah inovasi pemerintah daerah

dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelesaian kompleksitas permasalahan terkini.

B. Maksud Dan Tujuan Masterplan

Penyusunan Masterplan *Smart city* Kabupaten Pemalang bertujuan untuk merumuskan pembangunan Kabupaten Pemalang menjadi kota cerdas dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sejak tahun 2019 berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada. Masterplan *Smart city* Kabupaten Pemalang ini merupakan panduan bagi segenap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan *smart city* kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Manfaat yang ingin diraih dalam penyusunan Masterplan *Smart city* Kabupaten Pemalang adalah:

1. Meningkatkan kesiapan pembangunan *smart city* Kabupaten Pemalang (*smart city readiness*);
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*smart governance*);
3. Meningkatkan daya saing Kabupaten Pemalang melalui pembangunan citra daerah (*smart city branding*);
4. Meningkatkan produktivitas ekonomi Kabupaten Pemalang (*smart economy*);
5. Menjamin kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Pemalang (*smart living*);
6. Mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*smart society*).
7. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Pemalang yang selaras dengan kelestarian lingkungan (*smart environment*).

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang ini diperuntukkan untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara sehingga perlunya ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Undang- Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan terciptanya kepastian hukum. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 12 landasan berupa: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari 2 (dua) pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Ruang lingkup meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

5. Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Undang-undang bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menetapkan perangkat daerah. Asas pembentukan perangkat daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas

urusan pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

7. Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari adanya SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika .

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk dinas, Bidang dan Seksi. Perangkat Daerah tersebut diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah digunakan sebagai elevator internal dan elevator eksternal.

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika

Instruksi presiden Republik Indonesia ini dibuat karena pengembangan ilmu pengetahuan dan telematika merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Terdapat 3 (tiga) instruksi yang harus dipenuhi oleh pejabat negara dan daerah yaitu pertama melaksanakan lebih lanjut

pengembangan dan pendayagunaan telematika dengan berpedoman pada kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*

Instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 ini dibuat karena beberapa pertimbangan yaitu karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat sehingga dengan adanya teknologi komunikasi akan memudahkan dalam melakukan pengembangan terhadap *e-government*.

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah

Latar belakang dibuatnya keputusan menteri ini adalah disebabkan karena Pemanfaatan sistem perkantoran elektronik menyebabkan suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.

15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah

Panduan Pembangunan Infrastruktur portal pemerintah merupakan panduan yang dibuat dalam rangka penerapan *e-government* menuju *good governance*

yang harus ditetapkan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan buku panduan ini, aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yaitu arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan, arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan dan arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya.

16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun Nomor 41 Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *e-government*

Aplikasi *e-Government* adalah susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (*end user*), yaitu petugas instansi pemerintah maupun publik. Aplikasi *e-Government* dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *back office* dan *front office*.

17. Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart city* 2017 Gerakan Menuju 100 *Smart city*

Buku panduan penyusunan masterplan *smart city* 2017 gerakan menuju 100 *smart city* merupakan buku panduan yang berisikan tata cara penulisan dan isi konten masterplan *smart city* yang terdiri dari analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan *smart city* daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, analisis visi *smart city* daerah, analisis strategi pembangunan *smart city* analisis kebutuhan infrastruktur pendukung *smart city* dan analisis kebutuhan aplikasi dan piranti lunak pendukung *smart city*. Adapun tujuan dibuatkan buku panduan *smart city* ini berfungsi agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan *smart city* di tingkat pusat dan daerah serta menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam

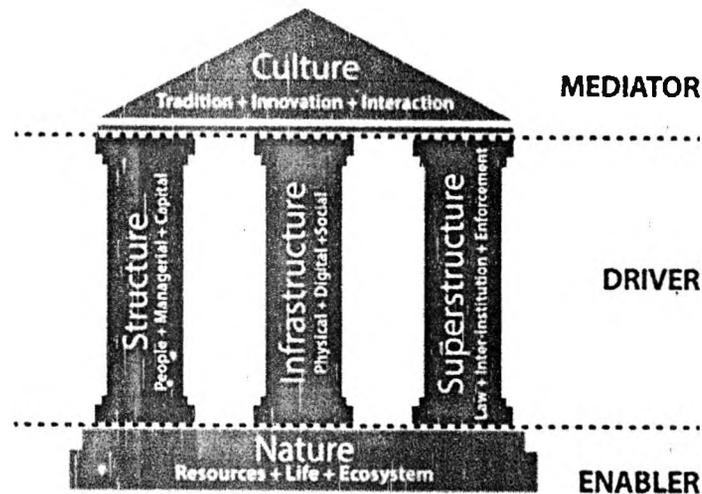
RP, MN dalam dokumen perencanaan *smart city* daerah. Kriteria masterplan *smart city* yang dibuat seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah
 - b. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
 - c. Objektif, tepat sasaran dan tepat guna
 - d. Berkesinambungan dalam menjaga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan
 - e. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.
18. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 tentang pelaksanaan Program Menuju 200 *Smart City*.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dalam gerakan menuju 100 *smart city* Indonesia, telah dilakukan 25 Kabupaten/Kota percontohan *smart city* setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten terpilih dan telah melakukan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

D. Kerangka Pikir Smart city

Pembuatan masterplan kota cerdas diawali dengan analisis terhadap 3 (tiga) kondisi yaitu visi pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dan kondisi daerah saat ini. Visi dan rencana pembangunan daerah dikaji dari dokumen RPJPD, RT/RW, dan RPJMD Kabupaten Pemalang. Kajian visi, rencana pembangunan, dan kondisi daerah terkini menghasilkan data tingkat kesiapan *smart city*. Gambar 1 merupakan ilustrasi kerangka pemikiran yang digunakan dalam pembuatan masterplan *smart city* yang ada di Kabupaten Pemalang.



Gambar 1. Elemen *smart city* readiness

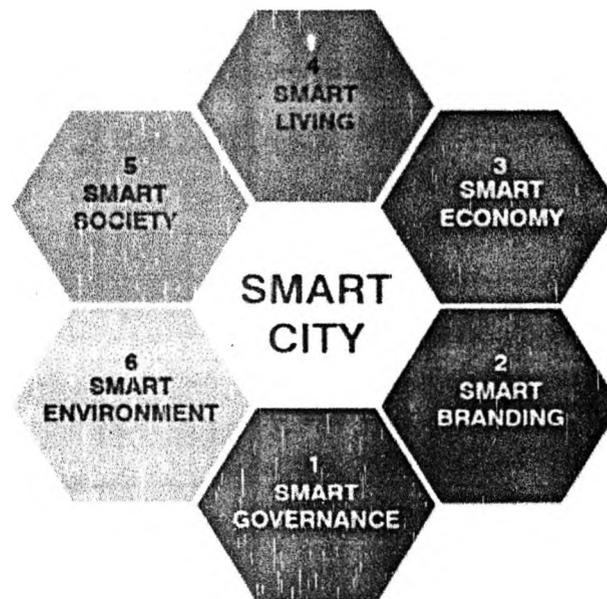
Sumber: Citiasia.Inc

Kesiapan *smart city* yang ada di Kabupaten Pemalang dianalisis menggunakan lima (5) pendekatan yaitu *nature*, struktur, infrastruktur dan suprastruktur, dan *culture*. Pada gambar 2 terlihat bahwa pendekatan struktur terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola. Infrastruktur terdiri dari pembangunan fisik, digital maupun sosial yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Pendekatan suprastruktur terdiri dari kebijakan, penyelenggaraan kebijakan dan tata laksana kelembagaan.

Peninjauan modal dan kinerja dari aspek *nature*, struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan *culture* menunjukkan kesiapan daerah Kabupaten Pemalang. Secara garis besar tingkat kesiapan *nature* dengan tingkat tinggi dan sudah mencapai *full readiness*. Kesiapan *nature* Dengan dijadikannya Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten yang cerdas maka domain pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang mengacu kepada 6 (enam) domain yaitu *smart living*, *smart economy*, *smart governance*, *smart society*, *smart environment* dan *smart branding*. Dengan adanya domain yang

akan dituju maka pemerintah dan stakeholders setempat membuat arahan program dan melakukan evaluasi dari program yang sudah dijalankan.

Gambar 2. Domain *smart city*



Sumber: Citiasia.Inc

BAB II

VISI SMART CITY KABUPATEN PEMALANG

A. Visi Smart city

Berdasarkan penjabaran tantangan yang harus dijawab dan harmonisasi dengan visi pembangunan daerah, provinsi, dan arah pembangunan nasional, maka visi *smart city* Kabupaten Pemalang dirumuskan sebagai berikut:

“Pemalang Cerdas yang Mudah, Nyaman dan Berkelanjutan”

Pemalang Cerdas menggambarkan arah pencapaian utama dari program *smart city* Kabupaten Pemalang. **Mudah** merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana terdapat kemudahan pelayanan, kemudahan pergerakan, kemudahan dalam membangun usaha dan kemudahan-kemudahan lainnya. **Nyaman** artinya Kabupaten Pemalang menjadi lingkungan tempat tinggal yang mendukung aktualisasi diri serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, konektivitas, keamanan dan pemenuhan kebutuhan akan kepuasan diri dan kebahagiaan. **Berkelanjutan** merefleksikan komitmen pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, bijaksana, dan menjamin keberlanjutan melalui upaya perlindungan, pemeliharaan serta pengayaan nilai keanekaragaman yang ada

B. Sasaran *Smart city*

Rumusan sasaran *smart city* di Kabupaten Pemalang menjabarkan target yang harus dicapai oleh Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program *smart city*, berikut ini adalah sasaran *smart city* dari Kabupaten Pemalang;

1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah.

Smart Governance di dalam domain *Smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis (*business process*) yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Secara umum terdapat 3 sasaran dari domain *smart governance* yakni;

- a. Pelayanan Publik (*Public Service*)
- b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)
- c. Efisien Kebijakan Publik (*Public Policy*)

2. *Smart Branding*

Domain *smart branding* merupakan istilah yang digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkungan lokal, nasional maupun internasional. *Smart branding* adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan produk suatu daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Sasaran dari domain *smart branding* dari Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. *Branding* Pariwisata
- b. *Branding* Investasi dan Usaha
- c. Citra Kota

3. *Smart Economy*

Domain *smart economy* menggaris bawahi yang berkaitan dengan tata kelola perekonomian. Domain ini lebih menitikberatkan perwujudan ekosistem perekonomian di daerah yang selaras dengan sektor unggulan daerah sehingga dapat memenuhi tantangan di era informasi yang dirupsi dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. Berikut ini adalah rumusan sasaran yang ada pada domain *smart economy* di Kabupaten Pemalang:

- a. Membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berdaya saing terutama pada sektor pertanian.
- b. Membangun ekosistem keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. *Smart Living*

Domain dari *smart living* menitikberatkan pada komponen mendukung kehidupan yang layak. Kualitas hidup dan juga komponen kebudayaan masyarakat merupakan komponen yang penting dalam mempengaruhi dalam *smart city* seperti tersedianya kebutuhan-kebutuhan akan rasa keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan hidup. Sasaran *smart living* berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pemalang:

- a. Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah
- b. Mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana transportasi
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

5. *Smart Society*

Pada domain *smart society* berfokus pada sosial masyarakat sebagai unsur sebuah kota. Manusia merupakan modal utama dari sosial masyarakat, maka dari itu sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud dalam individu dan komunitas-komunitas yang berdaya saing dan kreatif. Modal sosial masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini diterapkan dengan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, dengan meningkatnya peran sosial masyarakat maka menguat pula keserasian masyarakat dengan lingkungan. Nilai yang tertanam seperti inilah yang perlu dipertahankan dalam pengembangan konsep *smart city*. Maka dari itu berikut ini adalah sasaran dari *smart society* Kabupaten Pemalang.

- a. Mewujudkan komunitas fisik dan digital yang efisien
- b. Mewujudkan ekosistem belajar yang efisien
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat

6. *Smart Environment*

Domain *smart environment* merupakan domain lingkungan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta keindahan lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman. Sasaran dari domain *Smart Environment* adalah;

- a. Mengembangkan pembangunan yang peduli pada aspek lingkungan
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah yang efektif dan efisien
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Pemerintah Kabupaten Pemalang ingin mewujudkan visi dan sasaran pembangunan *smart city* melalui penetapan strategi pembangunan *smart city* yang efektif. Strategi pembangunan *smart city* terdiri dari 6 kelompok strategi sesuai dengan domain *smart city*. Domain *smart city* meliputi *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Pemalang berdasarkan domain *smart city* adalah sebagai berikut;

A. *Smart Governance*

Domain *smart governance* bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Berikut ini adalah strategi pengembangan *smart city* dari domain *smart governance*:

1. Melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi dan pelayanan publik
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas partisipasi publik.

B. *Smart Branding*

Domain *smart branding* bertujuan untuk memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, investasi, perdagangan dan citra kota. Dengan meningkatnya *brand value* daerah akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan

kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan *smart branding* Kabupaten Pemalang dapat dicapai dengan strategi-strategi yang mendukung. Adapun strategi pengembangan smart city dari domain *smart branding* sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekosistem investasi dan pariwisata yang mudah dan efektif
2. Mengembangkan citra kota (*city appearance*) dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul di Kabupaten Pemalang,

C. *Smart Economy*

Domain *smart economy* merupakan tata kelola perekonomian yang pintar dengan tujuan mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, peningkatan *financial literacy* masyarakat dengan mewujudkan ekosistem transaksi keuangan (*less-cash society*). Pasar pun tidak luput dari perhatian. Seluruh stakeholders harus duduk bersama untuk merumuskan strategi pertumbuhan tentang pengembangan pasar yang tematik dan pasar dengan pendekatan baru, pengembangan pasar geografis baru, segmen demografis, ataupun benar-benar pengguna baru. Berikut ini adalah strategi pembangunan smart city dari domain *smart economy*:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, agrominapolitan dan produk unggulan daerah.
2. Penembangan kerjasama dengan para pelaku usaha.
3. Membangun ekosistem ekonomi digital melalui transaksi nontunai.

D. *Smart Living*

Domain *smart living* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Sasaran utama domain *smart living* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Berikut ini adalah beberapa strategi dari domain *smart living* Kabupaten Pemalang:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi orang, barang dan jasa
3. Peningkatan kualitas penanganan bencana alam

E. *Smart Society*

Domain *smart society* merupakan domain yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah wilayah. Interaksi manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis. Domain fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan dari *smart society* untuk mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*) dan sistem keamanan (*security*). Berikut ini adalah strategi dari *smart society*:

1. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan
2. Mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang peduli terhadap isu strategis Kabupaten Pemalang
3. Mengembangkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan luar sekolah.

F. Smart Environment

Domain keenam dalam sebuah *Smart city* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar. Lingkungan pintar yang dimaksud adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *smart environment* di dalam *Smart city* adalah arah untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dari visi kota cerdas, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart city* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendukungnya. Berikut ini adalah strategi dari domain *smart environment* :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi ramah lingkungan
3. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, berkelanjutan dan harmonis antara kawasan permukiman dan kawasan industri

BAB IV

RENCANA AKSI KESIAPAN SMART CITY

Rencana aksi kesiapan *smart city* Kabupaten Pemalang merupakan acuan dalam meningkatkan tingkat kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program *smart city*. Rencana aksi ini disusun sebagai instrumen utama untuk memastikan kesibm'ungan ide, gagasan, dan kolaborasi pada 4 rencana berikut;

- a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.
- b. Pembangunan Infrastruktur pendukung *smart city*.
- c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart regency*.
- d. Penguatan SDM melalui literasi *smart regency*

A. Rencana Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan *Smart City*

Pembangunan dan pengembangan Kabupaten Pemalang melalui perumusan kebijakan dan kelembagaan *smart city* merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan ber-etos kerja tinggi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Adapun rumusan rencananya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan *Smart City*
2. Penguatan Kelembagaan *Smart City* (Dewan, termasuk lembaga lain)
3. Perluasan jaringan kerjasama

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung *Smart city*

Rencana pengembangan infrastruktur pendukung *smart city* merupakan rencana yang memuat kebutuhan infrastruktur agar tujuan pembangunan *smart city* ini dapat tercapai. Secara umum infrastruktur yang akan dikembangkan dalam program *smart city* adalah infrastruktur digital, infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Adapun rumusan inisiasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur fisik TIK
2. Pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi
3. Pengembangan kawasan wisata pesisir, punggung dan gunung
4. Penyediaan alat pengolahan energi alternatif

C. Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak Kabupaten Pemalang merupakan upaya perwujudan tata kelola daerah yang lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan pengembangan aplikasi yang diperlukan oleh Kabupaten Pemalang:

1. Peningkatan tata kelola data informasi yang terintegrasi secara interkoneksi dan *interoperability*
2. Digitalisasi pelayanan seluruh urusan pemerintahan

D. Rencana Penguatan Literasi *Smart city*

Literasi digital adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat, menemukan, memanfaatkan serta mengkomunikasikan konten digital secara efektif dan efisien. Pengetahuan dan pemanfaatan konsep *smart city* perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan konsep *smart city*. Untuk mewujudkan pemahaman tersebut, maka terdapat program- program yang berkaitan dengan literasi *smart city*, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi informasi dan komunikasi bagi ASN
2. Peningkatan kualitas masyarakat di bidang ICT dan smart city
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi publik

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Bab ini akan memaparkan program Quick Wins dan peta jalan program pembangunan smart city. Berikut merupakan *Quick Wins* dan peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Pemalang;

A. *Quick Wins*

Program *quick wins* merupakan program yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sentra Wisata Moga

Kecamatan Moga merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang yang posisinya berada di lereng bawah Gunung Slamet. Jika Dari pusat kota Kabupaten Pemalang, Kecamatan Moga terletak dibagian selatan dengan ketinggian wilayah lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Moga memiliki topografi berbukit dan bergunung sebagai imbas dari letak geografisnya yang berada di lereng bawah Gunung Slamet.

Sebagai wilayah yang berada di ketinggian lebih dari 500 mdpl, Kecamatan Moga memiliki kondisi cuaca yang dingin serta berudara sejuk. Selain itu, Kecamatan Moga juga dianugerahi keindahan alam. Sebagian besar wilayahnya dijadikan sebagai lahan pertanian untuk produk-produk hortikultura, sehingga pemandangan yang tersaji di wilayah tersebut berupa lereng-lereng perbukitan atau pegunungan yang dipenuhi dengan berbagai macam tanaman hortikultura.

Keindahan Kecamatan Moga tidak hanya bisa dilihat dari kawasan-kawasan pertanian khas dataran tinggi, tetapi juga pada kawasan permukimannya. Kawasan permukiman di Kecamatan Moga memiliki nuansa permukiman pedesaan di

wilayah pegunungan yang sangat kental. Rumah-rumah yang saling berdekatan dan dilalui jalanan yang kecil membuat suasananya menjadi lebih hangat dan dekat dengan masyarakat. Kecamatan Moga juga memiliki banyak sekali potensi destinasi wisata, khususnya destinasi wisata alam, seperti hutan cagar alam, curug, dan tempat pemandian alami.

Pengembangan Sentra Wisata Moga dan kawasan pendukungnya. Kecamatan Kecamatan Pulosari, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Randungkal dan Kecamatan Belik, telah banyak dilakukan terutama oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Moga. Salah satu inovasi pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan Desa Wisata Banyumudal dengan wisata unggulan berupa kawasan Cempaka Wulung dan Hutan Gondang Kinasih. Kawasan wisata ini kemudian dinamakan Wisata Cempaka Wulung dan Hutan Gondang Kinasih (CWGK). Kawasan wisata ini dikelola oleh BUMDes Desa Banyumudal dan akan dijadikan sebagai kawasan wisata andalan.

Kawasan wisata Moga pengembangannya tidak hanya sebatas pada pengembangan Kecamatan Moga sebagai sebuah kawasan wisata. Pengembangan juga dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama dengan Kecamatan Moga. Kecamatan lain yang berkarakteristik sama dengan Kecamatan Moga, seperti Kecamatan Pulosari, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Randudongkal, dan Kecamatan Belik dapat diturut dikembangkan sebagai kawasan *hinterland* atau pendukung kawasan wisata Moga.

Inovasi lain yang dikembangkan dalam pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi adalah penyelenggaraan Festival Wong Gunung. Festival Wong Gunung merupakan festival yang diadakan untuk menarik para wisatawan atau sebagai media promosi wisata Kabupaten Pemalang. Festival ini terdiri dari berbagai macam kegiatan dengan fokus utamanya berupa kegiatan kebudayaan

masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya budaya-budaya masyarakat pegunungan. Selain itu, Festival Wong Gunung juga terdiri dari berbagai kegiatan atau upacara untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan serta sebagai salah satu bentuk merawat Gunung Slamet.

Festival Wong Gunung dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dengan berbagai rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain Pamundutan Banyu Tuk Pitu yakni pengambilan Banyu Panguripan (Air Penghidupan) di 7 (tujuh) mata air yang ada di Gunung Slamet oleh pendekar dari Jurangmangu dan dipimpin oleh Juru Kunci Gunung Slamet dan sebagai pembuka Ritual Agung Banyu Panguripan dalam Festival Wong Gunung. Acara tersebut kemudian disambung dengan berbagai kegiatan lainnya hingga Banyu Panguripan kemudian diserahkan kepada 12 kepala desa untuk kemudian di tuangkan ke mata air yang ada di masing-masing desa sebagai simbol keprihatinan sekaligus rasa syukur terhadap kondisi air. Kegiatan lainnya adalah Wong Gunung Expo yang bertujuan mengenalkan berbagai produk lokal serta sebagai wadah berekspresi bagi komunitas kreatif. Terdapat pula kegiatan-kegiatan Resik Gunung atau bersih-bersih Gunung Slamet, Gelar Budaya, Kamping Kalihan Wong Gunung, dan lain sebagainya.

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Kecamatan Moga dan Sekitarnya Tahun 2018

No	Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	Kolam Renang Moga	1.790
2	Telaga Silating	6.505
3	Kebun Teh Semugih Moga	10.834
4	Jambe Kembar	21.203

5	Pos Pendakian Gunung Slamet	2.165
6	Curug Sibedil	5.562
Total		48.059

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Berdasarkan data kunjungan wisatawan pada tahun 2018, khususnya pada destinasi wisata yang berada di Kawasan Wisata Moga dan sekitarnya, terlihat jika jumlah kunjungan wisatawan mencapai 48.059 jiwa. Jumlah kunjungan ini telah mencapai target yang dicanangkan dari adanya program sentra moga yakni sebesar 2,4 % pertahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut dapat dikatakan hanya menyumbang sedikit dari jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pemalang. Melihat jumlah pengunjung wisatawan yang masih belum terlampaui signifikan di Kawasan Wisata Moga, maka diperlukan beberapa fokus kegiatan untuk pengembangan.

Secara garis besar, pengembangan moga kedepannya (Jangka Menengah dan Panjang) terfokus kepada 3 kegiatan. Kegiatan tersebut menyasar peningkatan di beberapa area berikut:

a. Aksesibilitas dan Pemasaran

Peningkatan aksesibilitas objek wisata dilakukan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana dasar pendukung pelayanan seperti jalan, penginapan, dan berbagai fasilitas umum. Peningkatan panjang dan kualitas jalan diharapkan akan mempermudah akses dari dan menuju objek wisata, selain itu hal ini juga diharapkan akan merangsang meningkatnya jumlah penyedia transportasi umum yang memfasilitasi perjalanan wisatawan. Dari aspek pemasaran peningkatan dilakukan dengan memaksimalkan metode *low budget, high impact* melalui partisipasi masyarakat terutama generasi

muca dalam berbagai kegiatan promosi baik secara online via social media maupun metode pemasaran online dan offline lainnya.

b. Atraksi dan Kelembagaan Pariwisata

Terselenggaranya berbagai pertunjukan atau atraksi menambah kesemarakkan destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang. Selama ini berbagai atraksi banyak mengangkat tema budaya, kedepannya tema ini akan diperkaya dengan tema-tema lainnya seperti kuliner, hobi, dan minat. Pengembangan wisata di daerah selatan ini diarahkan untuk menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dengan membentuk berbagai desa wisata dan kelembagaan formal maupun informal berupa organisasi pemuda, kelompok budaya, komunitas seni, maupun dewan pembina desa wisata.

c. Integrasi antar Paket Wisata

Peningkatan keterpaduan antar berbagai pilihan wisata yang tersedia di Kabupaten Pemalang akan berdampak kepada peningkatan efektivitas pengelolaan dan usaha pemasaran. Bagi wisatawan keterpaduan paket wisata akan semakin memudahkan sehingga akan terbentuk kesan positif dan pengalaman berwisata yang berkesan. Pada tahap pertama integrasi paket wisata ini akan dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kabupaten terutama di Kawasan Waliksarimadu. Sedangkan dalam jangka panjang akan dibangun keterpaduan antar berbagai paket wisata yang ada di Kab. Pemalang dengan paket wisata di kabupaten/kota tetangga seperti Tegal, Purbalingga, dan Pekalongan.

Dengan adanya ketiga fokus kegiatan pengembangan tersebut, kontribusi program sentra wisata moga terhadap jumlah wisatawan diharapkan akan naik dari sebesar 2,4% menjadi sebesar 2,75% pertahunnya.

2. E-Voting

E-Voting bertujuan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dengan cara yang lebih efisien untuk memangkas biaya, serta mempercepat penghitungan suara. Melalui e-voting, tidak diperlukan lagi pencetakan surat suara dan rekapitulasi hasil pemilihan secara manual.

E-voting sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi proses pemilu. Tantangan penerapan e-voting juga cukup besar, khususnya yang berkaitan dengan kompleksitas sistem, prosedur elektronik, dan keterbiasaan warga. Dalam hal keamanan sistem, e-voting memiliki banyak fungsi, termasuk enkripsi, pengacakan, komunikasi, dan sistem keamanan.

Dalam menerapkan e-voting, dibutuhkan suatu standar sistem yang mampu mendukung kinerja e-voting dengan baik. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu lembaga penguji independen yang bertugas untuk menguji sistem e-voting untuk meyakinkan kepada publik bahwa sistem e-voting bisa berjalan baik. E-voting memiliki kelebihan, antara lain hasil perhitungan suara menjadi lebih akurat, meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih, meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, meningkatkan aksesibilitas. Pemilih aktif

Berikut ini adalah data penggunaan E-voting dan juga jumlah data pemilih tetap pada tiap tahap.

Tabel 1. Jumlah Desa dan Jumlah DPT dalam E-voting 2018

No	Tahap	Jadwal	Jumlah Desa	Jumlah DPT (orang)	Total Suara Pemilih
1	1	02 September 2019	18	92.389	65.418
2	2	09 September 2019	18	86.033	56.645

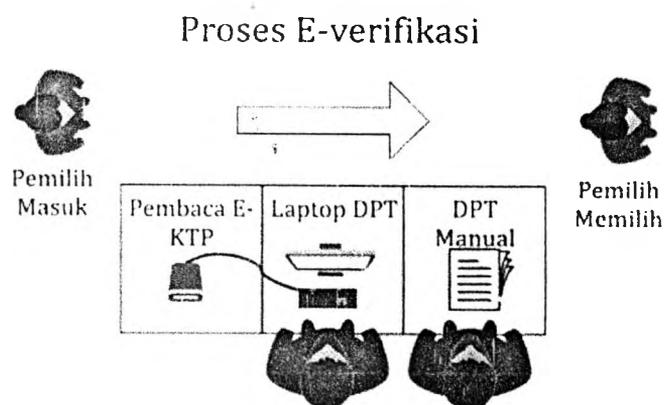
3	3	16 September 2019	16	66.566	44.335
4	4	23 September 2019	14	58.338	41.997
5	5	30 September 2019	18	48.271	35.221
6	6	07 Oktober 2018	18	86.149	53.958
7	7	14 Oktober 2018	18	99.493	73.111
8	8	21 Oktober 2018	18	72.255	57.681
9	9	28 Oktober 2018	18	65.255	52.620
10	10	04 November 2018	16	80.817	52.432
Total				755.566	533.418

Sumber: <https://pemalangkab.go.id/evoting/>

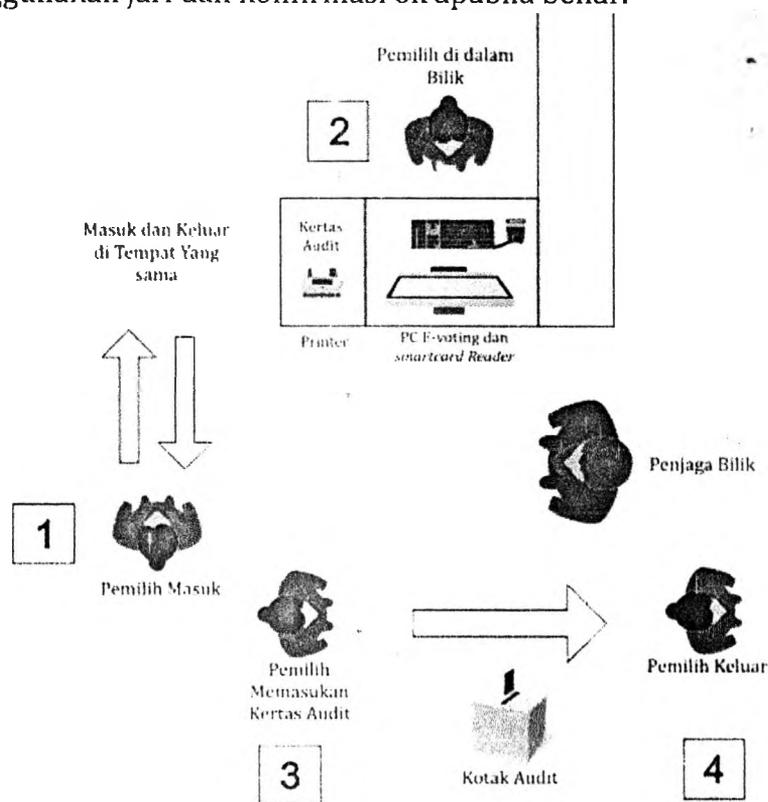
Penerapan E-Voting Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan di 172 desa yang terbagi dalam 10 tahap. Pada tahun 2018 partisipasi masyarakat dalam pemilihan mencapai 70,59% dengan total pemilih 533.418 Jiwa dari 755.566 DPT. Hal ini mengindikasikan bahwa program E-voting yang dilaksanakan untuk pertama kali ini cukup berhasil diindikasikan dengan tingginya partisipasi masyarakat.

Secara umum mekanisme proses e-voting adalah sebagai berikut;

- a. Warga membawa KTP elektronik ke TPS
- b. Melakukan verifikasi KTP elektronik dengan menggunakan sidik jari



- c. Petugas menyerahkan *smartcard* yang digunakan untuk mengaktifkan tampilan pada monitor bilik.
- c. Memasukkan *smartcard* ke *smartcard reader* yang ada di bilik
- d. Pilih calon sesuai dengan nomor urut dengan cara menyentuh foto calon menggunakan jari dan konfirmasi ok apabila benar.



- e. Memasukkan hasil *printout* pilihan ke kotak audit.

3. Jamilla Asiek (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan Plus Melaksanakan Asi Eksklusif)

Jamilla Asiek merupakan program pendampingan bagi ibu hamil dari masa kehamilan hingga masa menyusui. Jamilla Asiek muncul sebagai salah satu respons dari tingginya angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi di Kabupaten Pemalang. Tujuan awal/ dari adanya Jamilla Asiek adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lebih khusus lagi, tujuan dari Jamilla Asiek ialah menumbuhkan dukungan dan peran serta aktif seorang pendamping untuk lebih memberdayakan diri dalam bertanggung jawab dengan istrinya (ibu hamil). Sasaran program Jamilla Asiek adalah para ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi dan suami/anggota keluarga lain.

Program Jamilla Asiek sejauh ini telah dilakukan di Puskesmas Mojo, Kecamatan Ulujami. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu;

- a. Pendampingan ibu menyusui, ibu nifas dan ibu hamil

Dalam kondisi hamil, melahirkan dan nifas dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan untuk menjaga kondisi ibu. Pendampingan yang dilakukan berupa konsultasi rutin yang dilakukan di Puskesmas. Pendampingan ini dapat memberikan gambaran perkembangan kondisi ibu dan pemberian asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan.

- b. Pemberian kelas ibu hamil

Pengetahuan mengenai kehamilan dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan proses kehamilan. Kegiatan ini memberikan gambaran kehamilan, perubahan tubuh, perawatan kehamilan dan keluhan selama

proses kehamilan. Selain itu kelas ini juga memberikan materi senam ibu hamil,

c. Bekal (pemberian binaan) untuk ibu hamil

Selain pengetahuan mengenai kehamilan, dalam proses kehamilan ibu hamil memiliki risiko stress yang tinggi sehingga dibutuhkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun pikiran positif bagi ibu hamil. Pengadaan penyuluhan kesehatan dalam proses kehamilan bagi keluarga kurang mampu perlu dilakukan guna mengurangi risiko-risiko dalam proses kehamilan.

d. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

Perawatan bagi kesehatan ibu hamil dan janin di dalam kandungan selama masa kehamilan (mulai dari perawatan awal terjadinya konsepsi hingga melahirkan) istilah ini bias juga disebut perawatan antenatal. Perawatan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan secara rutin terhadap kesehatan tetapi juga dapat digunakan untuk media konsultasi dalam menghadapi ketidaknyamanan dan keluhan selama hamil, mengenali tanda-tanda kehamilan berbahaya dan lainnya.

e. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Persalinan aman dan terjamin bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu melalui kerjasama banyak pihak baik dari pemerintahan tokoh agama, dan juga penting kepada keluarga. Terdapat factor-faktor terkendalanya pertolongan persalinan bagi keluarga kurang mampu, hal ini bisa diakibatkan dari tidak memenuhinya persyaratan dalam menggunakan pelayanan jaminan persalinan sehingga tidaknya penjaminan pelayanan persalinan yang aman tapi juga pertolongan untuk tertib administrasi pelayanan.

Jamillah Asiek merupakan program yang dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Kerja sama dilakukan dengan melibatkan berbagai tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Pemalang. Selain

itu program ini juga terselenggara dengan bekerja sama dengan Dindikbud, Dinsos KBPP, dan Dinpermasdes.

Program Jamila Asiek memiliki sasaran menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan cakupan asi eksklusif. Pada tahun ini, terdapat 4 kasus kematian ibu hamil dan angka cakupan asi masih pada level 21,18%. Target pada tahun 2019 adalah angka kematian ibu 0 dan angka cakupan asi eksklusif mencapai 52%.

Selain sasaran tersebut, program Jamila asiek juga menargetkan perluasan cakupan pelayanan ke berbagai desa. Pada tahun 2018, program ini telah menjangkau 8 desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah pelayanan Puskesmas Mojo. Pengembangan di tahun 2019 adalah program ini dapat menjangkau 11 desa yang masih dalam pelayanan Puskesmas Mojo. Kedepannya, program ini dapat direplikasi untuk diterapkan di beberapa puskesmas lain sehingga cakupan program Jamila asiek dapat semakin luas.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayan, program Jamilla Asiek akan dikembangkan dengan memanfaatkan SMS Gateway sebagai media pendampingan berupa pengingat terkait tanggal penting dalam proses kehamilan dan menyusui. Inovasi ini akan diinisiasi bersama dengan penyedia layanan telekomunikasi dan posyandu setempat. Pemanfaatan SMS Gateway akan dilakukan diatas tahun 2021 agar program tersebut dapat dimasukkan sebagai program di dalam rencana strategis.

Peta jalan (Road Map) Rencana Aksi Pengembangan Kesiapan Smart City

Rencana Aksi	Tahun I 2018	Tahun II 2019-2021	Tahun III 2022-2024	Tahun IV 2025-2028	
Kelembagaan dan Kebijakan Smart City	Penyusunan Kebijakan Smart City				
	Penyusunan Masterplan Smart City				
	Regulasi Smart City				
	Penguatan kelembagaan dan perluasan kerjasama smart city				
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Melalui Bappenda				
		Peningkatan Kemitraan Masyarakat Dengan Badan Pembinaan Keamanan.			
Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur Fisik TIK				
	Pengadaan CCTV				
	Pengembangan Command And Operation Center				
	Pengadaan alat videoconference				
		Pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan Wi-fi di seluruh wilayah Kab Pemalang hingga sampai Jaringan Nirkabel			
		Pengembangan Server			
	Pengembangan Infrastruktur sosial dan ekonomi				
		Pemasangan Rambu Lalu Lintas Sesuai Kebutuhan			
		Pembangunan Rumah Sakit di Pratama tipe D di kecamatan COMal dan Radudongkal			
		Pengembangan Infrastruktur Dasar PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)			
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan				

Rencana Aksi	Tahap I 2018-2019	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2021-2022	Tahap IV 2022-2023
		Penambahan Unit Depo Damkar Di 3 Lokasi (Kecamatan Bodeh, Randudongkal, Dan Belik).		
		Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana, dan pemasangan Papan Jalur evakuasi		
	Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana, dan			
	Pembangunan RTH yang Terintegrasi (Pengembangan Perumahan			
	Penanganan sampah			
	Pengembangan Budidaya Perikanan			
	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
	Pengembangan perikanan tangkap			
		Intensifikasi dan diversifikasi Pertanian: Kelompok Tani		
		Intensifikasi Pertanian: Perkebunan		
		Intensifikasi Pertanian: Peternakan		
		Intensifikasi budidaya Kopi		
	Pengembangan kawasan wisata desisir punggung dan gunung			
	Pengembangan Sentra Wisata Moga			
		Branding Wisata Moga		
		Pengembangan Sistem Retribusi Cashless		
	Penyediaan alat pengolahan energi alternatif			
	Percepatan Pengelolaan Energi Alternatif			
Pengembangan Aplikasi	Peningkatan tata kelola data informasi yang terintegrasi secara interkoneksi dan interoperability			
	Pengembangan keamanan informasi			

Kategori Aksi	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2025-2029
		Program Integrasi Data (Info Pemalang, Pemalang dalam Angka, SI cemerlang)		
		Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik (Dashboard)		
		Integrasi Sistem Birokrasi (Dashboard)		
		Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		
		Pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu,		Penerapan sistem informasi geospasial
		Sistem Informasi Pajak		
		Pemasaran berbasis TIK melalui aplikasi Visit Pemalang		
		Digitalisasi pelayanan seluruh urusan pemerintahan		
		SIBIMA (Sistem Informasi Bina Marga)		
		Elektronik PBB, Elektronik PPHTB		
		E voting		
		Pendataan PNKS		
		Elektronik Planning, Elektronik Budgetting, Elektronik Monev		
		OSS		
		Peningkatan Pelayanan Pencairan Dana (SP2D Online)		
		TNDE		
		Program PPDB (penerimaan peserta didik baru) Secara online		
		Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer		
		Peningkatan Akses Informasi melalui SIPELITANAKER, dan Penyusunan bursa tenaga kerja.		

Perencanaan	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2025-2028
	Peningkatan Kepedulian Melalui Program Pengaduan Masyarakat. (HalloBupati)			
	Sintar Pemalang (Sistem Informasi Tata Ruang			
		Percepatan pada pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak berbasis jemput bola sampai daerah terpencil		
		Peningkatan Pelayanan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (Simdakeu dan SimdaBMD)		
Literasi untuk Pengembangan SDM	Peningkatan Kualitas ASN di Bidang di bidang Informasi dan Komunikasi			
		Optimalisasi penggunaan TIK dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan		
	Diklat/Bimtek TIK bagi ASN			
		Peningkatan kompetensi guru		
	Peningkatan kualitas masyarakat di bidang informasi dan komunikasi			
		Program pelatihan BABUUNIK (baca buku untuk implementasi kreatif)		
		Program semua anak bersekolah		
		Peningkatan masyarakat sadar bencana di zona merah bencana		
	Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja)			
	Pengurangan sampah			
	Pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarakan provinsi			

Rencana Aksi	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2025-2029
		Pembinaan IKM dan Sentra-sentra Industri		
		Festival Mangga		
		Festival kopi		
		Festival nanas		
		Gerakan UMKM digital		
		Pelatihan UMKM berbasis kluster		
		Peningkatan SDM Ekonomi kreatif		
	Peningkatan Kualitas dan kuantitas data dan informasi publik			
		Penyebarluasan informasi dan optimalisasi penggunaan media baik cetak maupun digital guna mencerdaskan masyarakat Kab Pemalang		
		Pengembangan Obyek Wista Pemalang Sleatan		
	Penyebaran Informasi Pariwisata yang semakin digiatkan			
		Pengembangan Branding Pariwisata Pusere Jawa		
		Pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
	JAMILLA ASIEK (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan dan Melaksanakan Asi Eksklusif)			
		Literasi Smart City		
		Sosialisasi Smart City		

Road Map Pembangunan Smart City Kabupaten Pemalang

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028	
SMART GOVERNANCE	SIBIMA (Sistem Informasi Bina Marga)				
	Elektronik PBB, Elektronik PPHTB				
	E voting				
	Pengadaan CCTV				
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak				
	Penyusunan Masterplan Smart City				
	Pendataan PNKS				
	Elektronik Planning, Elektronik Budgetting, Elektronik Monev				
	Pengembangan Command And Operation Center				
	Pengadaan alat videoconference				
	Sistem Informasi Pajak				
			Percepatan pada pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak berbasis jemput bola sampai daerah terpencil		
			Peningkatan Pelayanan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (Simdakeu dan SimdaBMD)		

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Regulasi Smart City		
		OSS		
		Program Integrasi Data (Info Pemalang, Pemalang dalam Angka, SI cemerlang)		
		Peningkatan Pelayanan Pencairan Dana (SP2D Online)		
		Penyebarluasan informasi dan optimalisasi penggunaan media baik cetak maupun digital guna mencerdaskan masyarakat Kab Pemalang.		
		Optimalisasi penggunaan TIK dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan.		
		TNDE		
		Pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan Wi-fi di seluruh wilayah Kab Pemalang hingga sampai Jaringan Nirkabel		

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		
		Sosialisasi Smart City		
		Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik (Dashboard)		
		Integrasi Sistem Birokrasi (Dashboard)		
		Pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu,		Penerapan sistem informasi geospasial
		Pengembangan Server		
		Diklat/Bimtek TIK bagi ASN		
		Pengembangan keamanan informasi		
Smart Branding	Pengembangan Sentra Wisata Moga			
	Penyebaran Informasi Pariwisata yang semakin digiatkan			
	Branding sentra wisata moga			
		Pemasaran berbasis TIK melalui aplikasi Visit Pemalang		
		Paket Wisata Susur Kali Comal		
		Pengembangan Branding Pariwisata Pusere Jawa		
		Pengembangan Sistem Retribusi Cash less		

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
SMART ECONOMY	Pengembangan Budidaya Perikanan			
	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
	Pengembangan perikanan tangkap			
		Pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarakan provinsi		
		Intensifikasi dan diversifikasi Pertanian: Kelompok Tani		
		Intensifikasi Pertanian: Perkebunan		
		Intensifikasi Pertanian: Peternakan		
		Pembinaan IKM dan Sentra-sentra Industri		
		Festival Mangga		
		Festival kopi		
		Festival nanas		
		Intensifikasi budidaya Kopi		
		Gerakan UMKM digital		
		Pelatihan UMKM berbasis kluster		
SMART LIVING		Pemasangan Rambu Lalu Lintas Sesuai Kebutuhan		

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Pembangunan Rumah Sakit di Pratama tipe D di kecamatan COMal dan Radudongkal		
		Pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
	JAMILLA ASIEK (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan dan Melaksanakan Asi Eksklusif)			
	Pengembangan Infrastruktur Dasar PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)			
SMART SOCIETY	Program PPDB (penerimaan peserta didik baru) Secara online			
	Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer			
	Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana			
	Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja)			
	Peningkatan Kepedulian Melalui Program Pengaduan Masyarakat. (HalloBupati)			
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan		
		Peningkatan kompetensi guru		
		Peningkatan Akses Informasi melalui SIPELITANAKER, dan		

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Penyusunan bursa tenaga kerja.		
		Penambahan Unit Depo Damkar Di 3 Lokasi (Kecamatan Bodeh, Pandudongkal, Dan Belik).		
		Peningkatan masyarakat sadar bencana di zona merah bencana.		
		Program semua anak bersekolah		
		Program pelatihan BABUUNIK (baca buku untuk implementasi kreatif)		
		Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana, dan pemasangan Papan Jalur evakuasi.		
		Peningkatan Kemitraan Masyarakat Dengan Badan Pembinaan Keamanan.		
		Peningkatan SDM Ekonomi kreatif		
SMART ENVIRONMENT	Percepatan Pengelolaan Energi Alternatif			
	Sinar Kemahang (Sistem Informasi Tata Ruang)			

Domain Smart City	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Penanganan sampah		
		Pengurangan sampah		
		Pembangunan RTH yang Terintegrasi (Pengembangan Perumahan)		

BAB VI

PENUTUP

Konsep awal pengembangan *smart city* adalah untuk mengurangi intervensi yang dilakukan manusia dengan mengedepankan teknologi. Ketika semua hal dikembalikan dengan teknologi, jadi lebih transparan dan membebaskan faktor kepentingan. Harapan kedepan bahwa efisiensi dalam penanganan masalah daerah dapat meningkat. Perlu dipahami bahwa konsep *smart city* ini akan mengubah paradigma dari konsep kerja yang konvensional menjadi lebih berbasis teknologi sehingga hasil yang dicapai menjadi ideal. Kerja sama antar instansi atau multi sektor juga diperlukan untuk menyukseskan proses implementasi pengembangan *smart city* Kabupaten Pemalang.

Buku II ini merupakan bagian inti dari *Guideline Masterplan Smart city* Kabupaten Pemalang. Arah pembangunan *smart city* ini masih terus dikembangkan dan diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan lain dalam agenda membangun Kabupaten Pemalang. Masterplan ini dihasilkan melalui analisis kondisi geografis, kesenjangan daerah, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang dan kemudian rangkuman dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Pemalang. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi tidak akan menuai hasil maksimal jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Masterplan *smart city* diharapkan dapat melengkapi dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan.

Lampiran 1

Tabel Sasaran, Strategi, dan Program Kerja Smart City Kab. Pemalang

SMART GOVERNANCE

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
SIBIMA (Sistem Informasi Bina Marga)	Program pembangunan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Menyediakan data base kondisi jalan dan jembatan yang up to date	Masyarakat, Pemerintah	Terselenggaranya keterbukaan informasi binamarga		APBD	Dinas PU	-	2018
Diklat/Bimtek TIK bagi ASN	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Menciptakan ASN yang handal dalam penguasaan TIK	ASN	Tercapainya penguasaan TIK	200 jt	APBD	BKD, Diskominfo	Lembaga diklat	2020-2023
Peningkatan Pelayanan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (Simdaku dan SimdaBMD)	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	OPD	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (opini WTP)	500 juta	APBD	BPKAD	Semua OPD Terkait, BPKP PT Lawang Sewu	2019
Peningkatan Pelayanan Pencairan Dana (SP2D Online)	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mempercepat proses transfer dana dari RKUD ke rekening penerima yang tercantum pada SP2D dan mempublikasikan melalui website	OPD dan Masyarakat	Proses pencairan SP2D dapat diakses oleh OPD dan Masyarakat melalui website	250 juta	APBD	BPKAD	Bank Jateng, Diskominfo	2019-2020
Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyikapi data dan informasi	ASN	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian berbasis TIK	2 M	APBD	BKD	OPD terkait	2020-2023

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
Percepatan pada pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak berbasis jemput bola sampai daerah terpencil	Program administrasi kependudukan	Program administrasi kependudukan	Memberikan kemudahan atas akses pelayanan publik dalam bidang administrasi dan kependudukan	Masyarakat	Terpenuhinya warga yang memiliki KTP dan KK dan akta yang lain	5,3 M	Dana Alokasi Umum	Disdukcapri	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Dinas Kesehatan/R SU/Puskesmas/bidan	2018-2021
Elektronik PBB, Elektronik PPHTB,	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Menciptakan bank data yang terintegrasi	Masyarakat Umum	Terdokumentasinya secara tertib sistem informasi bank data pada satu sistem	400 juta	APBD	Bappeda	BPKP	2018
Pendataan PNKS	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS) lainnya	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS) lainnya	Memberikan data yang akurat mengenai data kemiskinan	Masyarakat	Jumlah PNKS yang terdata	1.281.259.000	APBD	Dinsos		2018-2019
TNDE	Program pemanfaatan teknologi informasi kegiatan fasilitas layanan tata naskah dinas secara elektronik	Program pemanfaatan teknologi informasi kegiatan fasilitas layanan tata naskah dinas secara elektronik	Mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran secara tertib dan terintegrasi	Desa	Tercapainya sistem administrasi tata kelola manajemen perkantoran berbasis IT	350 juta	APBD	Sekda	Perangkat Daerah dan Desa	2019-2021
Elektronik Planning, Elektronik Budgetting, Elektronik Monev	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Mewujudkan sistem informasi anggaran yang terintegrasi guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda.	OPD	Terintegrasinya layanan sistem penganggaran dan perencanaan berbasis IT guna memudahkan pengambilan kebijakan	400 juta	APBD	Diskominfo	BPKAD Bappeda Dipermasdes	2018-2021
Program Integrasi Data (Info Pemalang, Pemalang dalam	Program pengembangan komunikasi dan informatika,	Program pengembangan komunikasi dan informatika,	Mewujudkan data satu sumber yang terpercaya	OPD	Terintegrasinya data antar seluruh OPD	600 juta	APBD	Diskominfo	Semua OPD Terkait	2019

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Angka, SI cemerlang)	Program Pengembangan data/informasi daerah	Program Pengembangan data/informasi daerah								
E voting	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Mewujudkan pemilihan kepala desa yang efisien dan efektif	Masyarakat/Desa	Terlaksananya di semua desa	3 M	APBD	Dispermasdes	Semua OPD Terkait	2018
Pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu,	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Terwujudnya bank data yang terintegrasi berbasis IT	OPD	Menciptakan kontribusi yang nyata bagi pengembangan data di setiap OPD	500 juta	DAU dan dana dekonsentrasi	DPU TR, Bappeda	Kearsipan, NGO atau lembaga diklat	2020-2023
Pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan Wi-fi di seluruh wilayah Kab Pemalang hingga sampai Jaringan Nirkabel	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Mewujudkan akses jaringan secara cepat, tepat, dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan	OPD	Mewujudkan data wilayah jaringan berbasis IT di Kabupaten Pemalang	2 miliar	APBD	Diskominfo	NGO atau lembaga survei	2019-2021
Penyebarluasan informasi dan optimalisasi penggunaan media baik cetak maupun digital guna mencedardaskan masyarakat Kab Pemalang.	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Menciptakan kemudahan atas akses informasi	OPD	Tingkat pemenuhan informasi website	500 juta	APBD atau Dana Alokasi Umum	Diskominfo	OPD, Masyarakat	2019-2020
Optimalisasi penggunaan TIK dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika	Memudahkan komunikasi antara stakeholder dan pemangku kepentingan	OPD dan stakeholder	Tercapainya komunikasi dan informasi publik antara pemangku kepentingan	300 juta	APBD	Diskominfo	OPD, Masyarakat	2019-2020

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
pemangku kebijakan.										
Penyusunan Masterplan Smart City	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Membuat acuan rencana program smart City	OPD	Terlaksananya program smart city	150 Juta	APBD	Diskom info Bappeda		2018-2019
Pengadaan CCTV	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Melakukan pengontrolan terkait lokasi strategis	Kawasan strategis	Tersedianya CCTV	150 Juta	APBD	Diskom info		2018-2021
Pengembangan Command And Operation Center	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Melayani pusat pengaduan layanan dll.	OPD	Terbentuknya Unit Command Center	200 Juta	APBD	Diskom info		2018-2021
Pengadaan alat videoconference	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Penggunaan rapat dalam keadaan yang tidak memungkinkan	OPD	Digunakannya alat tsb untuk kegiatan rapat	200 Juta	APBD	Diskom info		2018-2021
Penerapan sistem informasi geospasial	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Melakukan evaluasi pembangunan berbasis Sistem informasi geospasial data	OPD	Tersedia dan terintegrasinya data pembangunan berbasis spasial	300 Juta	APBD	Diskom info	BPS, BIG	2025-2028
Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik (Dashboard)	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Membuat Aplikasi yang ada lebih integratif	Masyarakat	Terintegrasinya aplikasi pelayanan publik	600 Juta	APBD	Diskom info	Semua OPD	2019-2024
Integrasi Sistem Birokrasi (Dashboard)	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Melakukan integrasi data antar system informasi yang ada	OPD	Terintegrasinya seluruh sistem birokrasi	700 Juta	APBD	Diskom info	Semua OPD	2019-2024
Pengembangan Server	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Meningkatkan server penunjang kegiatan smart city	OPD	% Kapasitas Server	3,5 M	APBD	Diskom info	Semua OPD	2019-2024
Regulasi Smart City	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Memberikan kepastian hukum terkait program smart city	OPD	Terbentuknya peraturan smart city	150 Juta	APBD	Diskom info	Semua OPD	2019
OSS	Program Peningkatan Iklim	Program Peningkatan Iklim	Memberikan pelayanan perizinan secara online	OPD dan	Perijinan Online (Terintegrasi dengan KTP)		APBD	DPMTSP		2019

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
	Investasi dan Realisasi Investasi	Investasi dan Realisasi Investasi		Masyarakat						
Pengembangan keamanan informasi	Program pengembangan persandian/informasi daerah	Program pengembangan persandian/informasi daerah	Meningkatkan keamanan informasi	OPD	Pemenuhan standar SMPI (Standar manajemen pengamanan informasi)	763 Juta (2018)	APBD	Diskom info	Semua OPD	2018-2028
Sistem Informasi Pajak	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keterbukaan informasi pendapatan pajak daerah	OPD	Terhimpunnya data informasi pajak dari setiap OPD di Bappenda	535 Juta	APBD	Bappenda	Seluruh OPD	2018-2020
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak	Pelaku usaha, Masyarakat	Jumlah penerimaan pajak melalui Hotel Melati Satu, Restoran, Bioskp, Papan Reklame, Penerangan jalan, Pasir dan krikil, Parkir, Air bawah tanah, Sarang burung wallet, Hak atas tanah dan bangunan, Bumi dan Bangunan	2,5 M	APBD	Bappenda	Seluruh OPD	2018-2021
Sosialisasi Smart City	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Pengembangan informasi dan komunikasi media masa	Mensosialisasikan kegiatan smart city kepada masyarakat	Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi, Ragam asal peserta smart city, pemahaman smart city	150 Juta	APBD	Diskom info	Seluruh OPD	2019

SMART BRANDING

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
Pemasaran berbasis TIK melalui aplikasi Visit Pemalang	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Penyusunan database perencanaan	Menyebarkan informasi pariwisata Kabupaten pemalang	Wisatawan	Tersebar nya informasi pariwisata melalui aplikasi visit pemalang	243.120.000	APBD	Dinas Pariwisata	Diskominfo	2019
Paket Wisata Susur Kali Comal	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata	Mengembangkan ragam sumber pembiayaan dan pengelolaan pariwisata	Kawasan Wisata	Pembangunan dermaga pemberangkatan sebanyak 3 (tiga) buah dari wilayah muara sungai comal ke hutan mangrove, Penataan kawasan hutan mangrove Mojo	400.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	LMDH perhutani dan Desa Mojo	2019
Branding Wisata Moga	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Mengembangkan ragam sumber pembiayaan dan pengelolaan pariwisata	branding	Terbangunnya kerja sama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisatawan	645.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	-	2017-2021
Pengembangan Branding Pariwisata Pusere Jawa	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisata	Branding	Peningkatan peran serta masyarakat melalui Duta Wisata, Pengembangan Desa wisata dan Kelompok sadar wisata	213.080.000	APBD	Dinas Pariwisata	Desa dan kelompok masyarakat	2019
Pengembangan Sentra Wisata Moga	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Meningkatkan kunjungan wisata	Kawasan Wisata	Pengembangan wisata unggulan (moga dan gambuhan)	14.139.530.000	APBD	Dinas Pariwisata	-	2017-2021

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Penyebaran Informasi Pariwisata yang semakin digiatkan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan di luar negeri	Meningkatkan kunjungan wisata	Wisatawan	Pelaksanaan promosi pariwisata (pameran, cetak leaflet, kalender dan buku profil	300.000.000	APBD	Dinas Pariwisata / Diskominfo	Produsen makanan khas, cinderamata dan pengelola pariwisata	2017-2021
Pengembangan sistem retribusi Cash less	Program pengembangan destinasi wisata	Program pengembangan destinasi wisata	Meningkatkan Kunjungan wisata	Wisatawan	Penggunaan retribusi cashless pada obyek wisata	200.000.000	APBD	Dinas Pariwisata	Pihak ketiga	2020

SMART ECONOMY

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Pembinaan IKM dan Sentra-sentra Industri	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan umkm yang terkonsentrasi memberikan efisiensi	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan IKM dan Sentra-sentra Industri (sentra gula merah, sentra makanan, sentra minyak asirih, sentra sapu glagah)	100.000.000	APBD	Disperindagkop	IKM, PKK	2019-2021
Pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarakan provinsi	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Menarik perkembangan usaha	Pelaku Usaha	Terlaksananya lomba kopi yang diselenggarakan provinsi Jawa Tengah	50.000.000	APBD	Dispermandes/ Koperasi dan UMKM	-	2019
Intensifikasi dan diversifikasi Pertanian:	Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan	Sentra - Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Gapoktan warungpring, belik, taman, Ulujami, Pulosari, Moga	2019
Festival Mangga	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Menarik perkembangan usaha dan pariwisata	Kelompok Hortikultura	Tingkat Penjualan/ nilai mangga	100.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Dinas Pariwisata	2019-2021
Festival kopi	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Menarik perkembangan usaha dan pariwisata	Kelompok perkebunan	Tingkat Penjualan/ nilai manggakopi	150.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Dinas Pariwisata	2019-2021
Festival nanas	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Menarik perkembangan usaha dan pariwisata	Kelompok Hortikultura	Meningkatnya nilai nanas	100.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Dinas Pariwisata	2019-2021

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Intensifikasi budidaya Kopi organik	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Menarik perkembangan usaha	Kelompok perkebunan	Meningkatkan hasil pertanian/perkebunan yang sehat	150.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Dinas Pariwisata	2019-2021
Inisiasi Intensifikasi Pertanian: Perkebunan	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan	Kelompok Perkebunan	Tambako, Kopi, Cengkeh, (Bibit, Saprodi Perkebunan	240.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Pulosari dan Moga	2019
Inisiasi Intensifikasi Pertanian: Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatkan produksi Peternakan	Kelompok Peternakan	Kerbau, Sapi, Unggas, Bantuan Kambing, Telur Puyuh ((pembelian lb (Inseminasi Buatan).	435.000.000	APBD	Dinas Pertanian	Bantarbolang, belik, Petarukan, pulosari, Cibiyuk	2019
Pengembangan perikanan tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap yang berdaya	Kelompok masyarakat nelayan	Produksi perikanan nelayan (Kg)	4,7 Milyar	APBD	Dinas Perikanan	Kec. Taman, Pemalang dan Petarukan	2018-2021
Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok masyarakat pembudidaya ikan	Produksi perikanan budidaya (Kg)	640 ratus juta	APBD	Dinas Perikanan	Kec. Petarukan dan Ulujami	2018-2021
Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Mengembangkan kawasan minapolitan	Kelompok masyarakat pembudidaya ikan	Presentasi sarana dan prasarana kawasan minapolitan yang memadai	1,6 Milyar	APBD	Dinas Perikanan	Kec. Petarukan dan Ulujami	2018-2021

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Gerakan UMKM digital	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Terselenggaranya sosialisasi	Pelaku Usaha (75 UMKM)	Tingkat pengetahuan UMKM tentang cara pemasaran online	25 Juta	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM		2019-2023
Pelatihan UMKM berbasis kluster	Program pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi lokal	Program pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi lokal	Terselenggaranya FGD OVOOP Kab. Pemalang	Pelaku Usaha (30 UMKM)	Terlaksananya FGD dan meningkatnya pengetahuan tentang tata cara pengelolaan manajemen UMKM OVOP	75 Juta	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM	Sadewa Market, IKM	2019-2024

SMART LIVING

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Pemasangan Rambu Lintas Sesuai Kebutuhan	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat Pengguna Transportasi Umum	Masyarakat	Tersedianya Rambu Lintas dan Halte di tempat Strategis	1.882.014.000	APBD	Dinas Perhubungan		2019-2021
Pembangunan Rumah Sakit di Pratama tipe D di kecamatan Comal dan Radudongkal	Program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa. Rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa. Rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan check kesehatan pada masyarakat	Masyarakat	Proporsi puskesmas terakreditasi proporsi pelayanan kesehatan sesuai standar, proporsi tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya.	6 Miliar	APBD	Dinas Kesehatan	Puskesmas	2019-2021
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal	Tenaga kesehatan Masyarakat	Terselenggara pelayanan kesehatan yang maksimal	2.462.805.000 (Menular) 765.000.000 (Tidak menular)	APBD	Dinas Kesehatan	Puskesmas	2019-2021
JAMILLA ASIEK (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan dan Melaksanakan Asi Eksklusif)	Program upaya kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Menumbuhkan Dukungan dan peran serta aktif seorang pendamping untuk lebih memberdayakan diri dalam bertanggungjawab dengan istrinya (ibu hamil)	Ibu Hamil Risiko Tinggi dan suami/anggota keluarga lain	Angka Kematian Bayi dan Ibu I K1 dan K4, (Tahap 1 dan 2) Tersedianya SMS Gateway (Tahap 3)	16.195.000.000 (BOK) 1.252.000.000 (Jampersal)	BOK dan Jampersal	Dinas Kesehatan	Puskesmas	2018-2024

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
Pengembangan Infrastruktur Dasar PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Masyarakat terkait LPJU	Masyarakat	Presentasi terbangunnya prasarana dan sarana utilitas umum (penerangan jalan)	2.000.000.000	APBD	Disperkim	Dishub, DPU, Diskominfo	2019-2028

SMART SOCIETY

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Program pelatihan BABUUNIK (baca buku untuk implementasi kreatif)	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan literasi yang valid (tekstual, video, Online) terkait kehidupan sehari hari	Pelajar dan Masyarakat Umum.	Terselenggaranya pelatihan BABUUNIK	50 Juta	APBD	Dinpusarda	Diskominfo, Bukalapak	2019-2021
Program semua anak bersekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Menjamin semua anak usia sekolah bersekolah sesuai dengan jenjangnya, baik formal maupun informal	ATS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)	Tercapainya program wajar dikdas 12 th	-	APBN dan APBD	Dindikbud,	Pemerintah kecamatan, desa, dan BPS	2020
Program PPDB (penerimaan peserta didik baru) Secara online	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Menjamin penerimaan peserta didik baru jenjang SMP yang lebih efisien dan transparan	Peserta Didik Lulusan SD	Terfasilitasinya siswa lulusan SD untuk masuk pada layanan pendidikan dasar jenjang SMP	-	APBD	Dindikbud	Diskominfo	2018
Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatkan proses evaluasi belajar yang lebih efisien, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Jenjang SMP 116 Sekolah	Terlaksananya UN berbasis computer.	Th2017/2018, 66 sekolah anggaran 6 Milyar Th2018/2019 30 sekolah anggaran 3 Milyar Th2019/2020 30 sekolah anggaran 3 Milyar Total 116 Sekolah	APBD	Dindikbud	Diskominfo	2018

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerja sama	Tahun
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar	Tingkat keterpenuhan sarpras Pendidikan		-APBD	Dindikbud,	Dinas PUPN	2019
Peningkatan kompetensi guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar	Tenaga Pendidik	Tercapainya pemenuhan guru layak mengajar		APBD	Dindikbud,	Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, LPMP	2019
Peningkatan Akses Informasi melalui SIPELITANAKER, dan Penyusunan bursa tenaga kerja.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Perluasan, mempermudah, dan mempercepat akses masyarakat dalam pencarian kerja	Tenaga Kerja	Tercapainya akses informasi	100 Juta	APBD	Disnaker	Perusahaan dan penyelenggara Jobfair	2019
Peningkatan Kemitraan Masyarakat Dengan Badan Pembinaan Keamanan.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Memudahkan Komunikasi kerja sama Kecamatan, dan badan keamanan Desa (KST Kader Trantib)	Masyarakat	Kemitraan masyarakat dengan badan pembinaan keamanan	12 Juta dan Dana Desa	APBD (12 Juta dan Dana Desa	SatpolPP	Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantib)	2020-2021
Peningkatan Kepedulian Melalui Program Pengaduan Masyarakat. (HalloBupati)	Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Respon cepat, terhadap tanggapan aduan masyarakat	Masyarakat	Tingkat Penggunaan Aplikasi Hallo Bupati	450 Juta	APBD	Diskominfo (PPID/IKP)	Semua OPD, KSP (Kantor Staf Presiden)	2018-2023
Penambahan Unit Depo Damkar Di 3	Program peningkatan	Program peningkatan	Mempercepat Penanganan Bencana.	Kecamatan Bodeh,	Tersedianya sarana mobil damkar	2 Miliar	APBD	Satpolpp, Damkar, PU	Bpbd, Pmi, Dinsos, Dinkes,	2019

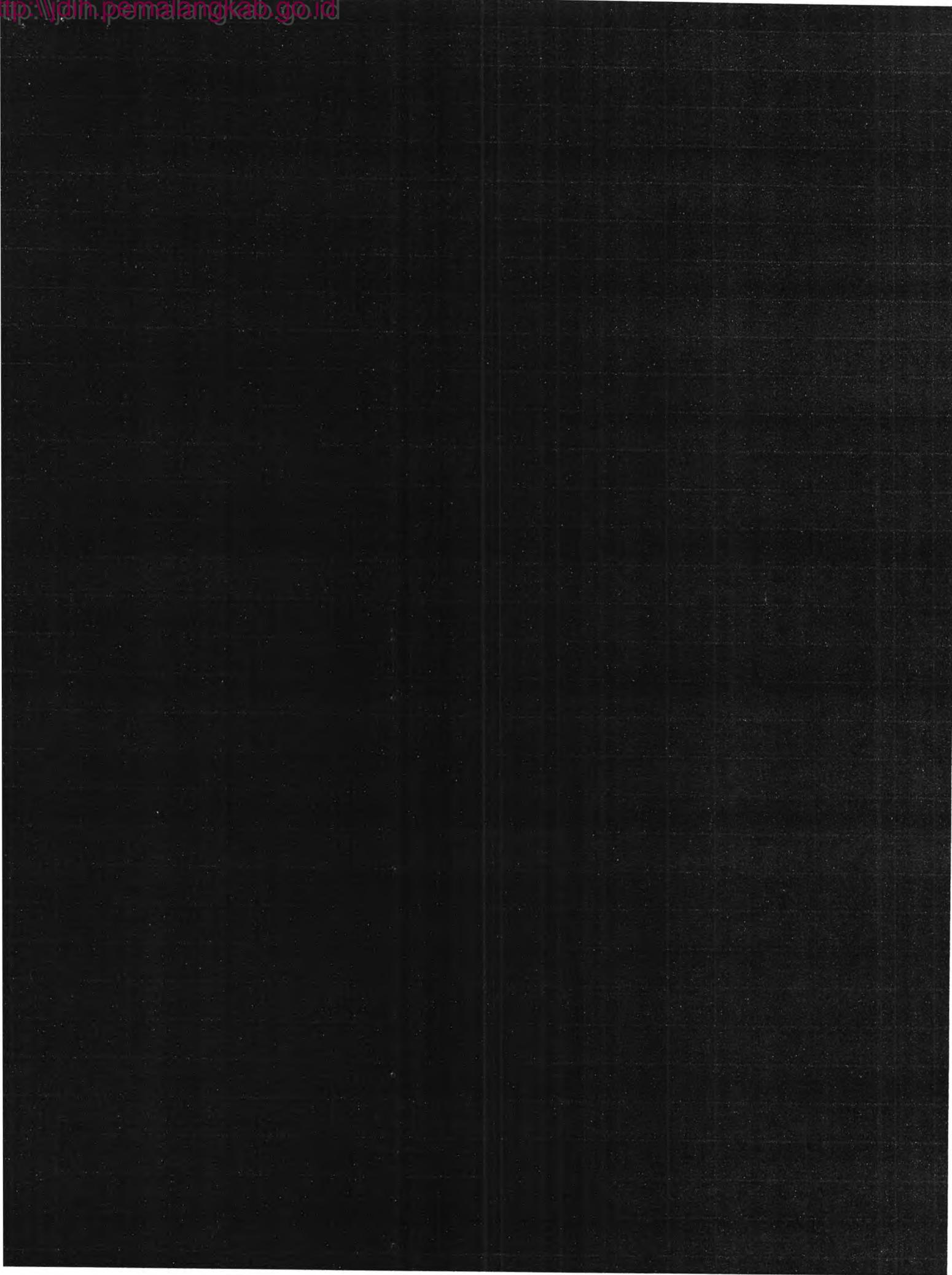
Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Lokasi (Kecamatan Bodeh, Randudongkal, Dan Belik).	sarana dan prasarana	sarana dan prasarana		Randudongkal dan Belik	Terbangunnya 3 Depo Damkar di Bodeh, Randudongkal dan Belik				Pemerintah Desa/ Kelurahan	
Peningkatan masyarakat sadar bencana di zona merah bencana.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Bencana	Desa Lokasi Rawan Bencana	Tingkat kesadaran masyarakat Warga Lokasi rawan Bencana di Desa Mojo Kecamatan Ulujami dan di Desa Bongas, Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul	150 Juta	APBD	BPBD	Dinsos, Dinkes, Satpolpp Linmas Inti, Orari (Organisasi Radio Amatir Ri Pemalang), Rapi (Radio Antar Penduduk Indonesia), Relawan Dan Ormas Terkait	2019
Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana, dan pemasangan Papan Jalur evakuasi.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Masyarakat secara cepat dan mudah mengetahui akan adanya bencana	Desa lokasi rawan bencana banjir	Terpasangnya EWS & IOT di Desa Mojo kec Ulujami	*Anggaran Provinsi	APBD Prov	BPBD	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Perguruan tinggi, Kecamatan, desa/rawan bencana.	2019-2021
Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana,	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Masyarakat secara cepat dan mudah mengetahui akan adanya bencana	Desa lokasi rawan bencana longsor	Terpasangnya EWS & IOT di Desa Tlagasana Kec Watukumpul	*Anggaran Provinsi	APBD Prov	BPBD	BPBD, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Perguruan tinggi,	2018-2021

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja)	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran (BLK)	Masyarakat pengangguran / masyarakat yang belum memiliki ketrampilan	% tenaga kerja yang terserap / yang mendapatkan pekerjaan	1,260 M	APBD	Disnaker	Lemmbaga Desa atau kefurahaan yang berbadan hukum (koperasi, Gapoktan, Lp MD, LKM)	2018-2021
Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Program pengembangan kemitraan pariwisata	menciptakan dan membentuk kreatifitas dan inovatif pada masyarakat	Masyarakat	Jumlah bintek pramuwisata/ pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang	54.235.000	APBD	Disparpora	Masyarakat	2020-2023
Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Program pengembangan kemitraan pariwisata	menciptakan dan membentuk kreatifitas dan inovatif pada masyarakat	Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan SDM ekonomi Kreatif	46.440.000	APBD	Disparpora	Masyarakat	2020-2023
Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Program pengembangan kemitraan pariwisata	menciptakan dan membentuk kreatifitas dan inovatif pada masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif	75.325.000	APBD	Disparpora	Masyarakat	2020-2023

SMART ENVIRONMENT

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Pembangunan RTH yang Terintegrasi (Pengembangan Perumahan)	Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan	Terbentuknya Lingkungan Ruang Publik yang asri Hijau serta	Masyarakat	RTH terbangun di 14 Kecamatan	10 Miliar	APBD, APBD Provinsi	Disperkim	Dinas PU, Kominfo Debdikbud, Perpustakaan, Diskoperindag	2019 - 2021
Penanganan sampah	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Menciptakan Lingkungan yang Bersih	Masyarakat Desa dan Perkotaan	Penanganan Sampah dapat ditingkatkan, target 70% (Pemilahan, Pengolahan, Pemrosesan) 1. Pembuatan Pupuk Organik dengan metode lubang berpori, komposter, rumah kompos 2. pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan, BBM (Pirolisis), Paving, Ecobrick 3. Pengolahan Gas Metana TPA	6 Miliar	APBD	DLH	Pemerintah Desa/Keurahan, OPD, Masyarakat, LSM	2018 - 2025

Program Kerja	Nomenklatur RPJMD	Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Usulan Anggaran	Sumber Pendanaan	OPD	Kerjasama	Tahun
Pengurangan sampah	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kelompok Swadaya, Masyarakat	Pengurangan sampah dapat ditingkatkan target 30% Beroperasinya bank sampah Komposter individu Rumah rongsok 3R Skala individu/Swasta	2,6 M	APBD	DLH	Swasta Individu OPD terkait	2018 - 2025
Percepatan Pengelolaan Energi Alternatif	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Mengimplementasikan pemanfaatan energi terbarukan	Kelompok Tani Ternak	Terbangunnya Biogas dari Kotoran Sapi di desa Karangtalok Kec. Ampelgading	200 Juta	APBD	DLH	Masyarakat Desa, Kelompok Tani Ternak	2018 - 2019
Sintar Pemalang (Sistem Informasi Tata Ruang)	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun RDTR Kawasan Perkotaan Pemalang.	50 Juta (2018)	APBD (DAU)	Dinas PUP R	DPMPTS Diskominfo	2018 - 2021





EXECUTIVE SUMMARY
MASTERPLAN
SMARTCITY
PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



LATAR BELAKANG

Dewasa ini, tren pembangunan suatu wilayah dihadapkan kepada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan ini hadir diantaranya sebagai hasil dari terjadinya fenomena revolusi digital, perubahan pola demografi, dan dinamika perubahan iklim. Di tengah derasnya arus perubahan daerah baik itu kota, kabupaten, maupun provinsi dituntut untuk mempersiapkan dan menyediakan sebuah ekosistem daerah yang menjamin peningkatan kualitas hidup dan mampu melindungi masyarakat dari efek deskruktif yang ada.

Permasalahan secara umum menggambarkan kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah perihal kependudukan. PBB memprediksi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Hal ini akan menimbulkan beberapa permasalahan

dan tantangan baru dalam pembangunan daerah. Misalnya mulai munculnya isu ketahanan pangan yang terancam, eksploitasi lahan terutama lahan pertanian menjadi lahan terbangun, mobilitas penduduk dan beberapa isu permasalahan lainnya. Isu tersebut akan semakin meluas, terutama di kawasan yang sedang bertransformasi dari budaya rural ke budaya urban.

Di lain hal, revolusi digital telah menyebabkan teknologi berkembang begitu pesat, mengakibatkan berubahnya cara dan gaya hidup manusia saat ini dan di masa depan. Revolusi ini terjadi bersamaan dengan hadirnya berbagai teknologi canggih seperti big data, internet of things, artificial intelligence, 5G, blockchain, dan yang paling familiar bagi masyarakat adalah teknologi internet. Penggunaan internet merupakan salah satu hal yang mendorong terciptanya perpindahan informasi yang cepat, tepat dan akurat



dari satu tempat atau satu kota ke kota lainnya. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan internet dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 72,41% dan mayoritas didominasi oleh masyarakat urban yang tinggal dan memiliki kehidupan di perkotaan. Pemanfaatan internet sendiri saat ini tidak hanya sebagai media untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk melakukan transaksi, komunikasi dan juga dimanfaatkan untuk berbisnis.

Dengan beragam dinamika perkembangan yang akan terjadi, dibutuhkan salah satu pendekatan pembangunan kota yang bersifat komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang sedang berkembang adalah kota cerdas. Pendekatan kota cerdas saat ini telah menjadi trend pembangunan kota atau daerah di seluruh dunia. Pendekatan kota cerdas tidak hanya mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi, namun juga tentang bagaimana membangun sebuah kota dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung terciptanya berbagai inovas terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khas perkotaan.

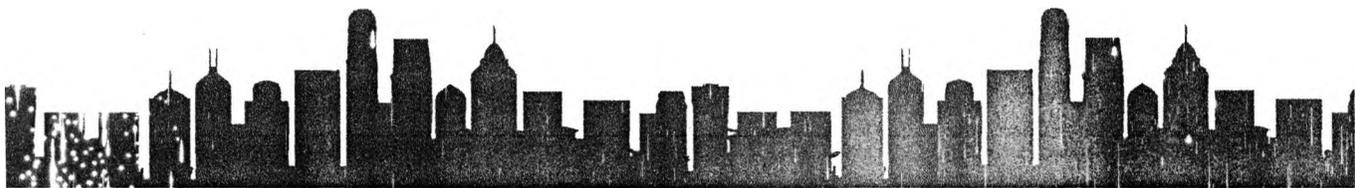
Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf presiden menginisiasi gerakan menuju 100 Smart city. Pada tahun 2017 terpilih 25 Kabupaten/kota yang akan menjadi fokus untuk didampingi oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas. Program ini menargetkan tercapainya target 100 Kota/Kabupaten yang memiliki konsep dan perencanaan pembangunan kota cerdas sampai tahun 2019.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 50 kabupaten/kota terpilih pada tahun 2018 dalam Gerakan 100 Smart city. Pembangunan kota cerdas Kabupaten Pemalang mengarah kepada konteks penggalan potensi dan antisipasi masalah yang berpotensi hadir di masa yang akan datang. Masterplan kota cerdas Kabupaten Pemalang, diharapkan dapat menjadi wadah inovasi pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyelesaian kompleksitas permasalahan terkini.



TUJUAN

- 1** Meningkatkan kesiapan pembangunan smart city Kabupaten Pemalang (*smart city readiness*);
- 2** Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*smart governance*);
- 3** Meningkatkan daya saing Kabupaten Pemalang melalui pembangunan citra daerah (*smart city branding*);
- 4** Meningkatkan produktivitas ekonomi Kabupaten Pemalang (*smart economy*);
- 5** Menjamin kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Pemalang (*smart living*);
- 6** Mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*smart society*);
- 7** Mewujudkan pembangunan Kabupaten Pemalang yang selaras dengan kelestarian lingkungan (*smart environment*).



VISI SMART CITY

“Pemalang Cerdas yang Mudah, Nyaman dan Berkelanjutan”

Pemalang Cerdas menggambarkan arah pencapaian utama dari program smart city Kabupaten Pemalang. **Mudah** merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana terdapat kemudahan pelayanan, kemudahan pergerakan, kemudahan dalam membangun usaha dan kemudahan-kemudahan lainnya. **Nyaman** artinya Kabupaten Pemalang menjadi lingkungan tempat tinggal yang mendukung aktualisasi diri serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, konektivitas, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan akan kepuasan diri dan kebahagiaan. **Berkelanjutan** merefleksikan komitmen pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, bijaksana, dan menjamin keberlanjutan melalui upaya perlindungan, pemeliharaan serta pengayaan nilai keanekaragaman yang ada.

SASARAN SMART CITY

SMART GOVERNANCE

- a. Pelayanan Publik (Public Service)
- b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy)
- c. Efisien Kebijakan Publik (Public Policy)

SMART BRANDING

- a. Branding Pariwisata
- b. Branding Investasi dan Usaha
- c. Citra Kota

SMART ECONOMY

- a. Membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berdaya saing terutama pada sektor pertanian.
- b. Membangun ekosistem keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

SMART LIVING

- a. Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah
- b. Mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana transportasi
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

SMART SOCIETY

- a. Mewujudkan komunitas fisik dan digital yang efisien
- b. Mewujudkan ekosistem belajar yang efisien
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat

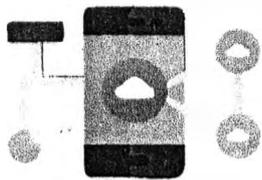
SMART ENVIRONMENT

- a. Mengembangkan pembangunan yang peduli pada aspek lingkungan
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah yang efektif dan efisien
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab



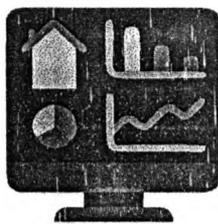
STRATEGI PEMBANGUNAN SMARTCITY

SMART GOVERNANCE



Integrasi Pelayan Publik dan Birokrasi

Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi dan pelayanan publik



Kelengkapan Tata Kelola Birokrasi

Melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi dan pelayanan publik



Kualitas Partisipasi Publik

Meningkatkan kualitas partisipasi publik.

SMART BRANDING



Branding Potensi Daerah

Mengembangkan ekosistem investasi dan pariwisata yang mudah dan efektif



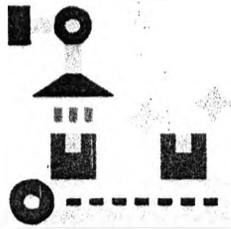
Citra Kota

Mengembangkan citra kota (city appearance) dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul di Kabupaten Pemalang,



STRATEGI PEMBANGUNAN SMARTCITY

SMART ECONOMY



Pengembangan Produk Lokal

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, agrominapolitan dan produk unggulan daerah.



Partnership

Pengembangan kerjasama dengan para pelaku usaha.



Ekonomi Digital

Membangun ekosistem ekonomi digital melalui transaksi nontunai.

SMART LIVING



Aksesibilitas dan Mobilitas

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi orang, barang dan jasa



Mitigasi Bencana

Peningkatan kualitas penanganan bencana alam



Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial



STRATEGI PEMBANGUNAN SMARTCITY

SMART SOCIETY



Literasi Digital

Mengembangkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan luar sekolah.



Komunitas Berdaya

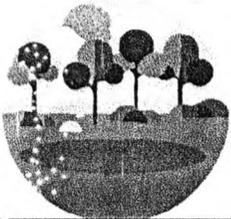
Mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang peduli terhadap isu strategis Kabupaten Pemalang



Keamanan Lingkungan

Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan

SMART ENVIRONMENT



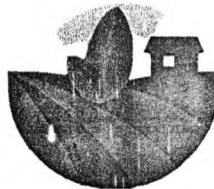
Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Energi Terbarukan

Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi ramah



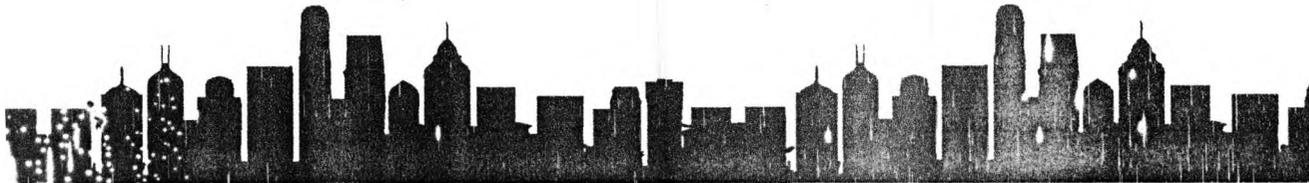
Konservasi dan Perlindungan

Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam



Lingkungan Tinggal

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, berkelanjutan dan harmonis.



RENCANA AKSI SMART CITY (Kebijakan)

1 Kebijakan & Kelembagaan

1. Penyusunan Kebijakan Smart City
2. Penguatan Kelembagaan Smart City
3. Perluasan jaringan kerjasama

2 Infrastruktur Pendukung

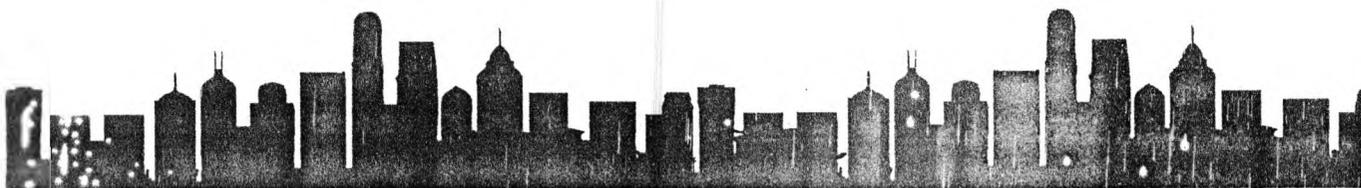
1. Pengembangan infrastruktur fisik TIK
2. Pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi
3. Pengembangan kawasan wisata pesisir, punggung dan gunung
4. Penyediaan alat pengolahan energi alternatif

3 Aplikasi & Perangkat Lunak

1. Peningkatan tata kelola data informasi yang terintegrasi secara interkoneksi dan interoperability
2. Digitalisasi pelayanan seluruh urusan pemerintahan

4 Penguatan Literasi Smart City

1. Peningkatan kompetensi informasi dan komunikasi bagi ASN
2. Peningkatan kualitas masyarakat di bidang ICT dan Smart City
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi publik



QUICK WINS

1 SENTRAWISATA MOGA

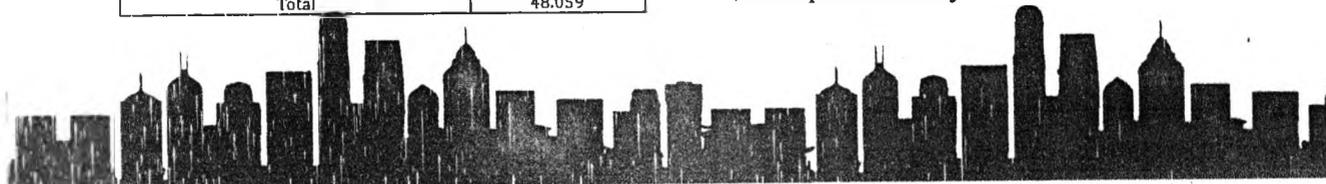
Pkeindahan Kecamatan Moga tidak hanya bisa dilihat dari kawasan-kawasan pertanian khas dataran tinggi, tetapi juga pada kawasan permukimannya. Kawasan permukiman di Kecamatan Moga memiliki nuansa permukiman pedesaan di wilayah pegunungan yang sangat kental. Rumah-rumah yang saling berdekatan dan dilalui jalanan yang kecil membuat suasananya menjadi lebih hangat dan dekat dengan masyarakat. Kecamatan Moga juga memiliki banyak sekali potensi destinasi wisata, khususnya destinasi wisata alam, seperti hutan cagar alam, curug, dan tempat pemandian alami.



Inovasi lain yang dikembangkan dalam pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi adalah penyelenggaraan Festival Wong Gunung. Festival Wong Gunung merupakan festival yang diadakan untuk menarik para wisatawan atau sebagai media promosi wisata Kabupaten Pemalang. Festival ini terdiri dari berbagai macam kegiatan dengan fokus utamanya berupa kegiatan kebudayaan masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya budaya-budaya masyarakat pegunungan. Selain itu, Festival Wong Gunung juga terdiri dari berbagai kegiatan atau upacara untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan serta sebagai salah satu bentuk merawat Gunung Slamet. Program ini menargetkan pertumbuhan wisatawan sebesar 2,75% pertahunnya

Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2018

No	Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	Kolam Renang Moga	1.79
2	Telaga Silat'ng	6.505
3	Kebun Teh Semugih Moga	10.834
4	Jambe Kembar	21.203
5	Pos Pendakian Gunung Slamet	2.165
6	Curug Sibedil	5.562
Total		48.059



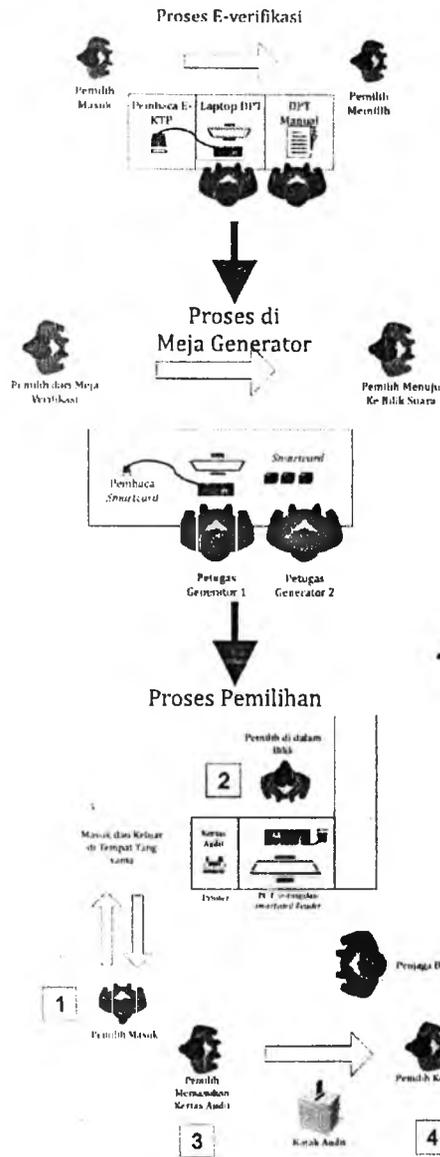
QUICK WINS

2 E-VOTING

E-Voting merupakan sistem pemungutan suara berbasis digital. Dengan berbasis digital, pemungutan suara akan lebih efisien untuk memangkas biaya, serta mempercepat penghitungan suara. Melalui e-voting, tidak diperlukan lagi pencetakan surat suara dan rekapitulasi hasil pemilihan secara manual.

Dalam menerapkan e-voting, dibutuhkan suatu standar sistem yang mampu mendukung kinerja e-voting dengan baik. Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga penguji independen yang bertugas untuk menguji sistem e-voting untuk meyakinkan kepada publik bahwa sistem e-voting bisa berjalan baik. E-voting memiliki kelebihan, diantaranya perhitungan suara menjadi lebih akurat, meningkatkan kenyamanan bagi pemilih, meningkatkan partisipasi & jumlah suara, meningkatkan aksesibilitas.

Pada Tahun 2018 E-Voting telah dilaksanakan di 172 desa yang terbagi dalam 10 tahap. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan mencapai 70,59% dengan total pemilih 533.418 Jiwa dari 755.566 DPT. Hal ini mengindikasikan bahwa program E-voting cukup berhasil dengan tingginya partisipasi masyarakat.



VIDEO Simulasi E VOTING Kabupaten Pemalang 2018



QUICK WINS

3 JAMILLA ASIEK

Jamilla Asiek merupakan program pendampingan bagi ibu hamil dari masa kehamilan hingga masa menyusui. Jamilla Asiek muncul sebagai salah satu respons dari tingginya angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi di Kabupaten Pemalang. Tujuan awal/ dari adanya Jamilla Asiek adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lebih khusus lagi, tujuan dari Jamilla Asiek ialah menumbuhkan dukungan dan peran serta aktif seorang pendamping untuk lebih memberdayakan diri dalam bertanggung jawab dengan istrinya (ibu hamil). Sasaran program Jamilla Asiek adalah para ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi dan suami/anggota keluarga lain.

Jamilla Asiek merupakan program yang dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Kerja sama dilakukan dengan melibatkan berbagai tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Pemalang. Selain itu program ini juga diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Dindikbud, Dinsos KBPP, dan Dinpermasdes. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, program Jamilla Asiek akan dikembangkan dengan memanfaatkan SMS Gateway sebagai media

pendampingan berupa pengingat terkait tanggal penting dalam proses kehamilan dan menyusui. Inovasi ini akan diinisiasi bersama dengan penyedia layanan telekomunikasi dan posyandu setempat.

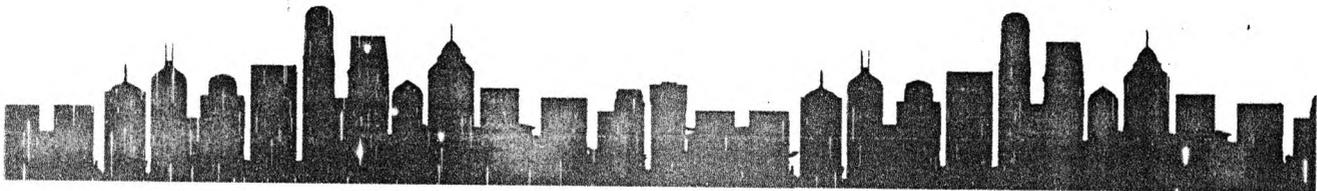
Program Jamilla Asiek memiliki beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan Menyusui
- b. Pemberian Kelas Ibu Hamil
- c. Perawatan Secara Berkala
- d. Pertolongan Persalinan
- e. Pemberian Bekal untuk Ibu Hamil

Kedepannya program jamilla asiek akan dikembangkan dalam bentuk perluasan cakupan. Saat ini Puskesmas Mojo telah melaksanakan program di 8 desa. Pada tahun 2019, cakupan pelayanan akan dikembangkan menjadi 11 Desa.



**PETA JALAN PROGRAM
SMART CITY**

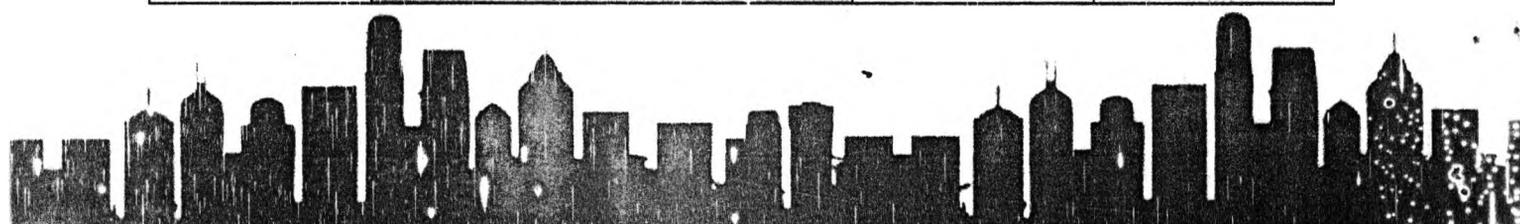


Road Map Pembangunan Smart City Kabupaten Pemalang

	Tahap I 2018	Tahap II 2019,2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2025-2028
SMART GOVERNANCE	SIBIMA (Sistem Informasi Bina Marga)			
	Elektronik PBB, Elektronik PPHTB			
	E voting			
	Pengadaan CCTV			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak			
	Penyusunan Masterplan Smart City			
	Pendataan PNKS			
	Elektronik Planning, Elektronik Budgetting, Elektronik Money			
	Pengembangan Command And Operation Center			
	Pengadaan alat videoconference			
	Sistem Informasi Pajak			
		Percepatan pada pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak berbasis jemput bola sampai daerah terpencil		
		Peningkatan Pelayanan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (Simdakeu dan SimdaBMD)		
		Regulasi Smart City		
	OSS			
	Program Integrasi Data (Info Pemalang, Pemalang dalam Angka, Si cemerlang)			
	Peningkatan Pelayanan Pencairan Dana (SP2D Online)			
	Penyebarluasan Informasi dan optimalisasi penggunaan media baik cetak maupun digital guna mencerdaskan masyarakat Kab Pemalang.			



	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Optimalisasi penggunaan TIK dalam rangka interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan.		
		TNDE		
		Pengembangan jaringan agar dapat memperluas jangkauan Wi-fi di seluruh wilayah Kab Pemalang hingga sampai Jaringan Nirkabel		
		Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		
		Sosialisasi Smart City		
		Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik (Dashboard)		
		Integrasi Sistem Birokrasi (Dashboard)		
		Pengembangan sistem informasi manajemen data dan peta tunggal dan terpadu,		Penerapan sistem informasi geospasial
		Pengembangan Server		
		Diklat/Bimtek TIK bagi ASN		
		Pengembangan keamanan informasi		
Smart Branding	Pengembangan Sentra Wisata Moga			
	Penyebaran Informasi Pariwisata yang semakin digiatkan			
	Branding sentra wisata moga			
		Pemasaran berbasis TIK melalui aplikasi Visit Pemalang		
		Paket Wisata Susur Kali Comal		
		Pengembangan Branding Pariwisata Pusere Jawa		
		Pengembangan Sistem Retribusi Cash less		
SMART ECONOMY	Pengembangan Budidaya Perikanan			
	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			



	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
	Pengembangan perikanan tangkap			
		Pelaksanaan lomba kopi yang diselenggarakan provinsi		
		Intensifikasi dan diversifikasi Pertanian: Kelompok Tani		
		Intensifikasi Pertanian: Perkebunan		
		Intensifikasi Pertanian: Peternakan		
		Pembinaan IKM dan Sentra-sentra Industri		
		Festival Mangga		
		Festival Kopi		
		Festival nanas		
		Intensifikasi budidaya Kopi		
		Gerakan UMKM digital		
		Pelatihan UMKM berbasis kluster		
SMART LIVING		Pemasangan Rambu Lalu Lintas Sesuai Kebutuhan		
		Pembangunan Rumah Sakit di Pratama tipe D di kecamatan COMal dan Radudongkal		
		Pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
		JAMILLA ASIEK (Jaga Ibu Hamil Sampai Melahirkan dan Melaksanakan Asi Eksklusif)		
		Pengembangan Infrastruktur Dasar BKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
SMART SOCIETY	Program PPDB (penerimaan peserta didik baru) Secara online			
	Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer			
	Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana			



	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja (kegiatannya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja)		
		Peningkatan Kepedulian Melalui Program Pengaduan Masyarakat. (HalloBupati)		
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan		
		Peningkatan kompetensi guru		
		Peningkatan Akses Informasi melalui SIPELITANAKER, dan Penyusunan bursa tenaga kerja.		
		Penambahan Unit Depo Damkar DI 3 Lokasi (Kecamatan Bodeh, Randudongkal, Dan Belik).		
		Peningkatan masyarakat sadar bencana di zona merah bencana.		
		Program semua anak bersekolah		
		Program pelatihan BABUUNIK (baca buku untuk implementasi kreatif)		
		Pemasangan Ews (Early Warning System), IOT (Internet Of Things) Untuk Deteksi Dini Bencana, dan pemasangan Papan Jalur evakuasi.		
		Peningkatan Kemitraan Masyarakat Dengan Badan Pembinaan Keamanan.		
		Peningkatan SDM Ekonomi kreatif		
SMART ENVIRONMENT	Percepatan Pengelolaan Energi Alternatif			
	Sistem Pemalang (Sistem Informasi Tata Ruang)			



	Tahap I 2018	Tahap II 2019-2021	Tahap III 2022-2024	Tahap IV 2026-2028
		Penanganan sampah		
		Pengurangan sampah		
		Pembangunan RTH yang Terintegrasi (Pengembangan Perumahan)		

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



